

**PENGANGKATAN ANAK MENURUT UU NO. 3 TAHUN 2006
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA
(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Makassar No:
01/Pdt.P/2009/PN.Mks)**



Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ARIS MUNANDAR
NIM : 10100111012

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016

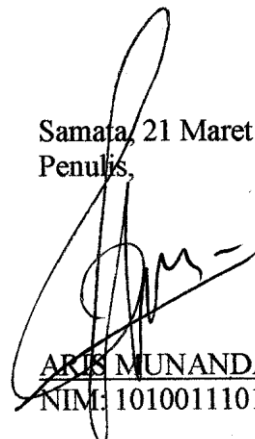
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIS MUNANDAR
NIM : 10100111012
Tempat/Tgl. Lahir : Jeneponto, 27 Oktober 1993
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Desa Jombe, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto
Judul : Pengangkatan Anak Menurut UU No. 3 Tahun 2006
Tentang Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Penetapan
Pengadilan Negeri Makassar No: 01/Pdt.p/2009/PN.Mks.)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 21 Maret 2016
Penulis,



ARIS MUNANDAR
NIM: 10100111012

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pengangkatan Anak Menurut UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (studi kasus penetapan Pengadilan Negeri Makassar no:01/Pdt.P/2009/PN.mks)", yang disusun oleh Aris Munandar NIM: 10100111012, mahasiswa Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 29 agustus 2016 M, bertepatan dengan 26 dzulqaidah 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 6 Oktober 2016 M.
5 Muharrami 1437 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, M.Hum.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. M. Jamal Janil, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar.

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin untuk berlandung serta bertawakkal kepadanya dengan jalan mensyukuri segala nikmat yang telah di berikannya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengangkatan Anak Menurut UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Makassar No: 01/Pdt.p/2009/PN.Mks.)”**. Shalawat dan salam diperuntukkan bagi junjungan Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing kita dengan ucapan, sikap dan keteladanan.

Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak bertepe, doa yang tiada terputus dari kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Kaimuddin dan Ibunda Hj. Karedaeng, yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudara-saudariku yang tercinta: Burhanuddin, dan Mustika A.md. Serta kakak ipar beserta keluarga-keluarga penulis, terimakasih atas perhatian, dan kasih sayangnya selama ini serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. Kendatipun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik mengenai materinya, bahasanya serta sistematikanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik berupa moril maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Penghargaan dan ucapan terimakasih yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.SI. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Supardin M.HI. selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar beserta ibu Dr. Hj. Fatimah, M.Ag. selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama;

4. Bapak Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag selaku pembimbing II. Kedua beliau, di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
6. Semua instansi terkait dan responden yang telah bersedia membantu dan memberikan data kepada penulis, yang telah memberikan masukan dan saran selama penyusunan skripsi ini;
7. Kepada Teman-Teman Seperjuangan SMA Negeri 1 BINAMU JENEPONTO Kelas XII. IPS. 1 Angkatan 2011, yang selalu memberi semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman kuliah Jurusan Peradilan Agama Angkatan 2011, terimakasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya selama ini;
9. Kepada sahabat-sahabat REDCOFF MUSIK PROJECT, MANIFESTO BAND, dan PPA yang selalu memberi semangat selama penyusunan skripsi ini.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun melalui doa

dan harapan penulis, Semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah swt.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terimakasih yang tak terhingga.

Samaja, 21 Maret 2016
Penulis,


ARIS MUNANDAR
NIM: 10100111012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
ABSTRAK	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	10
A. Anak, Kedudukan, dan Tanggungjawabnya.....	10
1. Pengertian Anak.....	10
2. Kedudukan Anak dalam Keluarga	15
3. Tanggungjawab.....	18
B. Hukum dan Kewarganegaraan	19
C. Eksistensi Pengangkatan Anak	24
D. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	28
E. Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Asing (WNA).....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	46
A. Lokasi Penelitian.....	46
B. Jenis Penelitian.....	46
C. Pendekatan Penelitian	47
D. Jenis dan Sumber Data.....	48
E. Metode Pengumpulan Data	48

F. Instrumen Penelitian.....	48
G. Teknik Pengelolaan dan Analisi Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 01/Pdt.p/2009/PN.Mks.....	50
B. Analisis Kewenangan Pengadilan agama Atas Pengangkatan Anak menurut UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.....	65
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet(dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	A postrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	A postrop
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	a	a
	kasrah	i	i
	dammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ : *kaifa*

حَوْل : *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ي	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
إ ... ي	Kasrah dan ya	i	I dan garis di atas
و ...	Dammah dan wau	u	U dan garis di atas

Contoh: : mata

: rama

: qila

: yamutu

D. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: :raudah al-atfal

المدينة الفاضلة : *al-madinah al-fadilah*

الحكمة : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh: ربنا : *rabbana*

نـجـنا : *najjaina*

الـحق : *al-haqq*

الـحج : *al-hajj*

نـعم : *nu‘ima*

عـدو : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى—), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh: عـلى : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عـربى : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:	الشّمس	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
	الزّلاّلة	: <i>al-zalzalalah</i> (<i>az-zalzalalah</i>)
	الفلسفة	: <i>al-falsafah</i>
	البلاد	: <i>al-biladu</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:	تأمرن	: <i>ta'muru>na</i>
	النوء	: <i>al-nau'</i>
	شيء	: <i>syai'un</i>
	أمرت	: <i>umirtu</i>

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:	<i>Fi Zilal al-Qur'an</i>
	<i>Al-Sunnah qabl al-tadwin</i>

I. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينَ اللّ *dinullah* بِا اللّ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّ *hum fi rahmatillah*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut di kenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Wa ma Muhammadunillarasul*

Innaawwalabaitinwudi ‘alinnasilallazibi

Bakkatamubarakan

Syahru Ramadan al-laziunzilafih al-Qur'a>n

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abu al-Walid Muhammad ibnuRusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulismenjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

ABSTRAK

Nama : Aris Munandar

Nim : 10100111012

Judul : Pengangkatan Anak Menurut UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Makassar No: 01/Pdt.p/2009/PN.Mks.)

Pokok masalah skripsi ini adalah bagaimana pengangkatan anak menurut UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-*breakdown* kedalam sub-sub masalahnya, yaitu: 1). Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Makassar No: 01/Pdt.P/2009/PN.Mks ? 2). Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama atas pengangkatan anak menurut UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama?

Dalam merampungkan analisis terhadap penetapan ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, situs internet yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Selain itu penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait, yakni majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar, majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, normatif dan sosiologis yaitu cara pendekatan permasalahan yang diteliti berdasarkan pada aturan Undang-Undang. Selanjutnya berdasarkan data yang ada, penulis berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum.

Berdasarkan analisis penulis terhadap penetapan pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri Makassar, maka diperoleh hasil antara lain: (1) Permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan di Pengadilan Negeri oleh pemohon yang beragama Islam merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama tetapi dalam ruang lingkup Pengadilan Agama, pengangkatan anak terhadap warga negara asing lebih cenderung pada perwalian yaitu pemeliharaan anak demi kesejahteraan anak angkat tersebut, sebab dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab antara anak dan orang tua kandung. Dalam kaitannya dengan penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri haruslah mengutamakan kepentingan anak angkat agar hubungan hukumnya dengan orang tua kandungnya tidak terputus sesuai dengan hukum Islam. (2) Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing yang ditetapkan di Pengadilan Negeri bagi pemohon yang beragama Islam, dengan sendirinya timbul akibat hukum terhadap anak angkat yang berhak mewarisi dari orang tua angkatnya, sebab kedudukannya sama dengan anak kandung. Namun akibat hukum yang seperti ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pengadilan Agama dan hukum Islam, sehingga majelis hakim yang memeriksa dan memutus penetapan ini kurang cermat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Dalam kenyataannya tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi. Kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak.

Apabila di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan. Disamping itu, salah satu tujuan dari perkawinan yang dilakukan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak. Begitu pentingnya hal anak ini, sehinggamenimbulkan berbagai peristiwa hukum misalnya, ketiadaan anak, perceraian, poligami, dan pengangkatan anak yang merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan walaupun bukan satu-satunya alasan. Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin juga merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan.

Dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan

emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok ke dalam kelompok keluarga yang lain.¹

Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak yaitu untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga yang setelah bertahun-tahun belum dikarunia seorang anakpun. Dengan mengangkat anak diharapkan supaya ada yang memelihara di hari tua, untuk mengurus harta kekayaan sekaligus menjadi generasi penerusnya.

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenaistatus anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya, status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan Surat Ederan Mahkamah Agung tanggal 7 April 1979 Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak dikatakan bahwa “pengesahan pengangkatan anak warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu

¹ Muderis Zaini, Adopsi: *Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 8

penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak dilakukan dengan akta notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri”²

Menghadapi kenyataan itu maka pranata-pranata sosial dan hukum telah mengantisipasi hal itu, dengan memberikan alternatif kepada pasangan suami istri yang tidak punya anak karena alasan lain untuk mengangkat anak, sehingga dengan pengangkatan ini diharapkan kehidupan rumah tangga dari suami-istri tersebut dapat semarak dan harmonis lagi.

Alternatif tersebut juga berlaku bagi suami-istri untuk mengangkat anak antar warga negara yang mulai dilakukan setelah perang dunia kedua. Ketika itu mulai tampak keinginan orang dari negara maju untuk mengangkat anak dari negara miskin, yang mereka sebut dari dunia ketiga. Alasannya tak lain adalah rasa sosial dan kemanusiaan, dan keinginan memberi bantuan kepada yang lebih miskin dari adanya fakta, bahwa banyak orang di negara maju tak dapat mempunyai anak sendiri.

Adapun dengan adanya berbagai macam aturan hukum yang mengatur pengangkatan anak, menunjukkan betapa pengangkatan anak dipandang sebagai suatu masalah yang memperoleh pengaturan yang seksama dan memadai, agar tidak terjadi benturan-benturan hukum.

Namun dengan timbulnya kewenangan Pengadilan Agama dalam mengangkat anak terutama bagi mereka yang beragama Islam, maka kesadaran umat muslim pun makin meningkat dan telah mendorong semangat untuk

² Muderis Zaini, Adopsi: *Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 112

melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, antara lain masalah pengangkatan anak.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, semula pengadilan yang berwenang memberikan penetapan pengangkatan anak, baik mereka yang tunduk pada hukum Islam adalah Pengadilan Negeri. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam pasal 49 huruf (a) poin 20 juga telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam bagi mereka yang beragama Islam.

Selanjutnya setelah terbitnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ini terlihat dalam kenyataannya ada suatu penetapan pengangkatan anak dengan penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2009/PN.Mks. yang disahkan di Pengadilan Negeri Makassar dimana calon bapak angkat anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia dan calon ibu angkat anak tersebut berkewarganegaraan asing yaitu warga negara Australia, dan pasangan suami istri tersebut beragama Islam. Sedangkan di satu sisi pengangkatan anak dengan istilah adopsi yang kedepannya anak angkat tersebut akan putus hubungan nasabnya dengan orang tua kandung dan dalam hukum Islam sendiri tidak mengenal pengangkatan anak dengan memutuskan hubungan nasab, akan tetapi lebih mengarah pada pemeliharaan anak.

Dalam hal ini telah terjadi kesenjangan antara teori dan kenyataan yang ada. Oleh sebab itu dengan keberadaan aturan perundang-undangan ini sangat diperlukan sebagai pedoman dalam menerapkan kewenangan memeriksa dan mengadili pemohon pengangkatan anak maupun aneka masalah lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut, maka ditentukan masalah pokok skripsi ini, yaitu: Bagaimana pengangkatan anak menurut UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama? Adapun sub-sub masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Makassar No: 01/Pdt.P/2009/PN.Mks ?
2. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama atas pengangkatan anak menurut UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Adapun judul skripsi ini adalah Pengangkatan Anak Menurut UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Makassar No: 01/Pdt.p/2009/PN.Mks.). Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru bagi pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penyusun merasa perlu untuk memberikan penjelasan terhadap beberapa kata yang dianggap penting antara lain:

Pengangkatan anak menurut peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang

mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.³

Peradilan agama adalah lingkungan peradilan yang dibawah oleh Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang.⁴

Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus pada pembahasan ini, akan dibatasi hanya dalam wilayah Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Kelas 1A, dan titik objek studinyapun terletak pada kasus-kasus pengangkatan anak.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta untuk menunjukkan keaslian dalam penelitian ini, maka dirasakan sangat perlu untuk mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penulisan ini. Berkaitan dengan tema pembahasan dalam skripsi telah penulis temukan karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan tema pembahasan skripsi ini. Adapun karya-karya itu adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Alasan Wasiat di PA.

³Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

⁴ UU Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Surabaya (No:22/Pdt.P/2006/PA.Sby)”⁵ oleh Queen Khairun Nisa Mairo mahasiswi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhsyah Pada Tahun 2007. Permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah apa yang di jadikan dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan permohonan pengangkatan anak dengan alasan wasiat. Hasil dari skripsi tersebut menyimpulkan bahwa penetapan tersebut sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan syarat tidak terputusnya hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya.

Kedua, skripsi yang berjudul ”Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan Anak Angkat di PA Blitar (Studi Kasus Putusan Reg.No.419 K/Ag./2000)” oleh Mutia Farida Mahasiswi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhsyah pada tahun 2011. Dalam skripsi tersebut di bahas tentang pertimbangan atau alasan hukum menurut pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung terhadap alasan untuk mengabulkan anak angkat berhak mendapat 1/3 bagian, selain itu, skripsi ini juga membahas analisis Hukum Islam tentang adanya wasiat wajibah terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkat sehingga batasan 1/3 tersebut dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.⁶

⁵Queen Khairun Nisa Mairo, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Alasan Wasiat di PA. Surabaya (No:22/Pdt.P/2006/PA.Sby)*, (Surabaya: skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007), h. 21

⁶Mutia Farida, *Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan Anak Angkat di PA Blitar (Studi Kasus Putusan Reg.No.419 K/Ag./2000)*, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), h. xi

Ketiga, skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Tentang Pengangkatan Anak oleh Wanita Yang Belum Menikah” oleh Agung Setyo Puji mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhsyah Pada Tahun 2012. Hasil skripsi tersebut adalah walaupun undang-undang yang berlaku menyebutkan bahwa status orang yang mengangkat harus sudah menikah dan belum dikaruniai anak maka dalam putusan ini, maka yang jadi pertimbangan hakim adalah memperhatikan kesejahteraan calon anak angkat sehingga tidak perlu khawatir lagi. Hakim punya wewenang untuk memutus perkara meskipun dalam kenyataannya belum sesuai dengan perundang-undangan hakim dianggap makhluk mulia dan memiliki hati nurani dan mempunyai rasa keadilan untuk menangkap nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat sebagai hukum riil.⁷

Dengan berpedoman pada penjelasan diatas tersebut, maka menurut hemat penulis bahwa tema tentang Pengangkatan Anak Menurut UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Makassar No: 01/Pdt.p/2009/PN.Mks.) jelas berbeda dengan kajian-kajian yang sudah dipaparkan diatas, sehingga menarik untuk dikaji kembali dan menemukan jawabannya secara jelas dan detail.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

⁷Agung Setyo Puji, *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Tentang Pengangkatan Anak oleh Wanita Yang Belum Menikah*, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), h. 57

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus penetapan Pengadilan Negeri Nomor:01/Pdt.P/2009/Pn.Mks.
2. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan Pengadilan Agama atas pengangkatan anak warga negara asing berdasarkan hukum Islam.

Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan hukum. Disamping itu, dapat juga digunakan sebagai landasan bagi penelitian yang lebih spesifik untuk pengembangan ilmu hukum.
2. Kegunaan praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai suatu pola penyelesaian terhadap permasalahan pengangkatan anak bagi calon orang tua angkat baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang beragama Islam dalam kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang ditemui dalam praktek.

BAB II TINJAUAN

TEORITIS

A. Anak, Kedudukan, dan Tanggungjawabnya

1. Pengertian Anak

Anak dalam Kamus Hukum diartikan sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah kepentingannya.¹

Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1990 bertempat di New York menyelenggarakan Convention on the Rights of the Childs (CRC), di antara hasil-hasilnya menyatakan bahwa anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. (Pasal 1 Convention on the Rights of the Childs).

Aris Britania, menjelaskan bahwa di dalam al-quran, anak sering disebutkan dengan kata *walad-awlad* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlud*, tetapi disebut *al-janin* yang berarti *al-mastûr* (tertutup) dan *al-khafy* (tersembunyi) di dalam rahim ibu. Kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-wâlid* dan *al-wâlidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata *ab* tidak mesti berarti ayah kandung. Selain itu, Al Quran juga menggunakan istilah *thifl* (kanak-kanak) dan *ghulâm* (muda remaja)

¹ M. Marwati dan Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya: *Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality publisher, 2009), h. 41

kepada anak, yang menyiratkan fase perkembangan anak yang perlu dicermati dan diwaspadai orang tua, jika ada gejala kurang baik dapat diberikan terapi sebelum terlambat, apalagi fase *ghulém* (remaja) dimana anak mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa. Al-Qur'an juga menggunakan istilah *ibn* pada anak, masih seakar dengan kata *bana* yang berarti membangun atau berbuat baik, secara semantis anak ibarat sebuah bangunan yang harus diberi pondasi yang kokoh, orang tua harus memberikan pondasi keimanan, akhlak dan ilmu sejak kecil, agar ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip dan kepribadian yang teguh. Kata *ibn* juga sering digunakan dalam bentuk *tashghir* sehingga berubah menjadi *bunayya* yang menunjukkan anak secara fisik masih kecil dan menunjukkan adanya hubungan kedekatan (*al-iqtirab*). Panggilan *ya bunayya* (wahai anakku) menyiratkan anak yang dipanggil masih kecil dan hubungan kedekatan dan kasih sayang antara orang tua dengan anaknya. Begitulah mestinya hubungan orang tua dengan anak. Hubungan yang dibangun dalam fondasi yang mengedepankan kedekatan, kasih sayang dan kelembutan. Sikap orang tua yang mencerminkan kebencian dan kekerasan terhadap anak jelas tidak dibenarkan dalam al-Quran.²

Fitri, menyatakan anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Menurut John Locke, anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap

² Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Tnp, Jakarta, 2003, Dirjen, Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, (<http://assunah.or.id>), diakses pada 12 Februari 2016

rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Augustinus yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan. Anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.³

Yusuf Qardhawi, anak adalah rahasia orang tua dan pemegang keistimewaannya. Waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penerang dan sewaktu ia pulang ke rahmatullah, anak sebagai pelanjut dan lambang keabadian.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) pun memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 BW yang berbunyi : ‘belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin’.

Pengertian anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan belum pernah memiliki kawin. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 sesuai dengan Pasal 330 KUHPerdata mengenai sebelum kedewasaan.

³ Fitri, *Pengertian Anak Secara Kronologis dan Psikologis*, diposting pada 19 November 2008, (<http://duniapskolog.dagdigdug.com/category/psikologi-anak/> 2314), diakses pada 13 Februari 2016

⁴Yusuf Qardawi, Halal dan Haram dalam Islam , (<http://ilmucomputer2.blogspot.com/2009/09/pengertian-anak-angkat-menurut.html>), diakses pada 12 Februari 2016

Sedangkan Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

Kemudian menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 98 Ayat (1) menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum melaksanakan perkawinan.

Dalam Pasal 1 Konvensi hak-hak anak juga menyatakan bahwa “seseorang anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali di bawah Undang-Undang yang berlaku bagi anak, usia dewasa dicapai lebih awal”

Pengertian anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dan anak itu dalam arti, bahwa selaku hasil perbuatan bersetubuh dari seorang laki-laki dan seorang perempuan lahirlah dari tubuh si perempuan seorang manusia lain yang dapat

mengatakan, bahwa seorang laki-laki tadi adalah bapaknya dan seorang perempuan tadi adalah ibunya, sedang dia adalah anak kedua orang itu.⁵

Fitri, menjelaskan mengartikan anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan. Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Kasiram, mengatakan anak adalah makhluk yang sedang dalam taraf perkembangan yang mempunyai perasaan, pikiran, kehendak sendiri yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangannya.⁶

Pengertian anak juga mencakup masa anak itu exist (ada). Hal ini untuk menghindari kerancuan mengenai pengertian anak dalam hubungannya dengan orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua.

Anaklaut, menyatakan bahwa anak dalam Islam adalah warisan berharga dan amanah/titipan Tuhan kepada hambaNya. Anak dalam rumah tangga atau keluarga dapat dilihat dari dua dimensi alamiah, yaitu: pertama, anak sebagai buah alami (*sunnatullah*), hasil kekuatan rasa kasih sayang suami istri (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*) sebagai *Mawaddah* dan Rahmat Allah swt. untuk memperkuat bangunan

⁵ Wirjono Prodjodikoro; *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: vorkink, 1952), h. 58

⁶ Fitri, *Pengertian Anak Tinjauan Secara Kronologis dan Psikologis*, diposting 19 november 2008, (<http://duniapskologi.dagdigdug.com/category/psikologi-anakk/2314>), diakses pada 13 februari 2016

hubungan rumah tangga yang rukun dan damai, bahagia dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kedua, anak sebagai kader penerus generasi, pelindung manakala orang tua disaat lemah dan pelanjut doa (ritual communication) manakala orang tuanya meninggal dunia memenuhi panggilan.⁷

Berdasarkan uraian pengertian anak di atas, penulis lebih memilih pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yakni anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan belum pernah memiliki kawin. Dimana pengertian anak dalam Undang-Undang ini sesuai dengan Pasal 330 KUHPerdara mengenai kebelum dewasaan.

2. Kedudukan Anak dalam Keluarga

Anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dan perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak dengan *li'an* (sumpah) bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dan perzinaannya dan pengadilan atas permintaan pihak berkepentingan memutuskan tentang sah/tidaknya anak.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Asal-usul seorang anak hanya bisa dibuktikan dengan Akta kelahiran autentik oleh pejabat yang berwenang, jika akta autentik tidak ada maka asal-usul anak ditetapkan oleh

⁷ Anaklaut, *Konsep Adopsi Dalam Islam dan Kaitannya Dengan Sumber Daya Manusia*, (<http://one.indoskripsi.com/node/4483>) diakses pada 14 Februari 2016

pengadilan berdasarkan pembuktian yang memenuhi syarat untuk kemudian dibuatkan akte kelahiran pada instansi pencatat kelahiran.

Berdasarkan Pasal 62 dan 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan, kewarganegaraannya akan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai Hukum publik maupun Hukum perdata.

Berdasarkan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri (dewasa) adalah 21 tahun. Sepanjang ia tidak cacat fisik atau pun mental atau belum kawin. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Apabila kedua orang tua anak tidak mampu, Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban orang tuanya.

Di sisi lain, berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan anak wajib menghormati orang tuanya dan wajib mentaati kehendak dan keinginan yang baik orang tuanya, dan jika anak sudah dewasa mengemban kewajiban memelihara orang tua serta karib kerabatnya yang memerlukan bantuan sesuai kemampuannya.

Aris Britania, menyatakan menurut *Wahbah al-Zuhaili*, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu: hak *nasab* (keturunan) hak *radia* (menyusui), hak *hadhanah* (pemeliharaan), hak *waiâyah* (wali), dan hak nafkah (alimentas). Dengan terpenuhinya lima kebutuhan ini, orang tua akan mampu

mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk mandiri. Kelahiran anak merupakan pewaris hukum.⁸

Dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya. Dan dengan hubungan nasab pula ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dan dengan nasab pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya.

Oleh karena itu hak dan tanggungjawab merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Anak memiliki hak dan orang tuanya dibebani tanggung jawab terhadap anaknya. Jika digolongkan hak anak dapat dikategorikan dalam empat kelompok besar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.

Sebaliknya anak sudah semestinya berbuat baik dan berkhidmat kepada orang tuanya secara tulus, orang tua lah yang menjadi sebab terlahirnya ia ke dunia. Al-Quran memerintahkan supaya anak memperlakukan orang tua dengan sebaik-baiknya. ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah serta menyapihnya (menyusui) selama dua tahun sehingga sepatutnya anak bersyukur kepada Allah swt. dan kepada kedua ibu bapaknya.

Allah swt. mengharuskan manusia berbuat kebaikan dan mentaati kedua orang tua, hanya terkecuali jika keduanya memaksa menyekutukan Allah, dan jika salah seorang atau keduanya berusia lanjut dalam pemeliharaan anak jangan

⁸ Aris Britania, *Hak Dan Kedudukan Anak dalam Keluarga Setelah Terjadinya Perceraian*, (<http://assunah.or.id>), diakses pada 16 Februari 2016

sekali-kali mengatakan “ah” atau membentak, ucapkan pada mereka perkataan yang mulia.⁹

Maka dari itu orang tua memiliki hak atas anak, ketika mereka sudah tua dan lemah berhak mendapatkan jaminan nafkah dari anaknya yang sudah mampu mencari nafkah sendiri, mereka berhak menerima warisan jika anaknya meninggal terlebih dahulu.

3. Tanggungjawab

Aris Britania, menyatakan bahwa menurut ajaran Islam, tujuan utama dari perkawinan adalah melestarikan keturunan, oleh karenanya anak menjadi bagian yang sentral dalam keluarga, anak adalah amanah Allah yang senantiasa wajib dipelihara, diberi bekal hidup dan dididik. Begitu keluarga dikaruniai keturunan timbul berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi suami isteri demi kemaslahatan anak, kelangsungan hidup anak baik jasmani maupun rohani sangat ditentukan oleh dapat tidaknya anak meraih haknya secara baik. Lahirya anak di satu sisi merupakan nikmat karunia Allah swt. di sisi lain adalah amanah yang jika orang tua berhasil menjaga dan menjalankannya justru nikmat bertambah dengan anak yang saleh dan berbakti serta mendoakan orang tuanya, jika orang tua gagal berarti ia telah mengkhianati amanah sehingga ia dinilai tidak bertanggung jawab.¹⁰

Tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada segi fisik semata tetapi yang lebih penting adalah usaha peningkatan potensi positif agar menjadi

⁹ Ahmad Rofiq; *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajawali pers, 2000), h. 365

¹⁰ Aris Britania, *Hak Dan Kedudukan Anak dalam Keluarga Setelah Terjadinya Perceraian*, (<http://assunah.or.id>), diakses pada 16 Februari 2016

manusia berkualitas. Orang tua bertanggung jawab agar anak tidak menyimpang dan natural dari potensi kebbaikannya karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu, artinya para ibu sangat berperan dalam menentukan nasib anak sehingga surga bagi anak sepenuhnya berada dibawah kekuasaan mereka, karena kuatnya hubungan emosional seorang ibu dapat membentuk jiwa anak hampir sekehendak hati.¹¹

Suryadi, menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak, pencerdasan kognitif (intellectual intelligence), emosi (emotional intelligence), dan spiritual (spiritual intelligence). Orang tua harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak membeda-bedakan anak baik dan segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangannya serta menghargai potensi anak dengan sikap kasih dan sayang.¹²

B. Hukum dan Kewarganegaraan

Ketentuan-ketentuan tingkah laku manusia beraneka ragam tergantung dari berat ringannya reaksi yang dibebankan dalam memberikan penilaian. Berdasarkan berat ringannya reaksi tersebut ada ketentuan yang mengaturnya baik dengan kesopanan, kesusilaan dan hukum.

Salah satu persyaratan diterimanya status sebuah negara adalah adanya unsur warganegara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu, sehingga warganegara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warga dan negara lain.

¹¹ Wirjono Projodikoro: *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Vorkink, 1952), h.119

¹² Suryadi, *Jurnal Musawa Dengan Judul Anak dalam Perspektif Hadis*, (<http://assunah.or.id>), diakses pada 14 Februari 2016

Pengaturan mengenai kewarganegaraan ini biasanya ditentukan berdasarkan salah satu dari dua prinsip, yaitu prinsip ‘*lus soil*’ atau prinsip ‘*lus sanguinis*’.¹³

Warganegara mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari suatu Negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan kata *citizen* (Bahasa Inggris) yang mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Warga negara
- b. Petunjuk dan sebuah kota
- c. Sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air
- d. Bawahan atau kawula

Dengan memiliki status warga negara, orang memiliki hubungan antara warga negara. Hubungan itu nantinya tercermin dalam hak kewajiban seperti halnya kita sebagai anggota organisasi, maka hubungan itu berwujud peranan, hak dan kewajiban secara timbal balik. Anggota memiliki hak dan kewajiban terhadap anggotanya. Selanjutnya kewarganegaraan (*citizenship*) artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Warga Negara adalah Warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

¹³ Anonim, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Upt Mku, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007, h. 35

¹⁴ Anonim, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Upt Mku, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007, h. 46

M. Asad Ammaduddin, menyatakan bahwa warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota negara dan tak terpisahkan dengan negara tersebut.¹⁵

Secara jelas hal-hal mengenai kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 (amandemen) Pasal 26 (definisi warga negara), Pasal 27 (kedudukan warga negara), Pasal 28 (hak-hak warga negara), yang terurai sebagai berikut:

a. Definisi warga negara

1. Warga negara adalah orang yang tinggal di dalam sebuah negara dan mengakui semua peraturan yang terkandung di dalam negara tersebut.
2. Warga negara adalah salah satu unsur penting dalam pembentukan sebuah negara, dan lain-lain.

b. Definisi hak warga negara, antara lain :

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
4. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam Pemerintahan
5. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai, dan sebagainya.

c. Definisi kewajiban warga negara, antara lain:

¹⁵ M. Asad Ammaduddin, *Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara*, (<http://kewarganegaraan.blogspot.com/2008/07/menghargai-persmaan-kedudukan-warga.html>), diakses pada 16 Februari 2016

1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan serangan musuh.
2. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa, agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.
4. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, dan lain-lain.

d. Definisi kewajiban pemerintah terhadap warga negara, antara lain:

1. Memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga negara
2. Memberikan rasa aman bagi setiap warga negara
3. Melindungi dan membela semua warga Negara Indonesia yang berada di negara lain
4. Membantu fakir miskin dan anak-anak yang terlantar
5. Mengusahakan sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat banyak

M. Asad Ammaduddin, menyebutkan bahwa untuk menentukan kewarganegaraan seseorang ada tiga asas yang harus dipahami:¹⁶

¹⁶ M. Asad Ammaduddin, *Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara*, (<http://kewarganegaraan.blogspot.com/2008/07/menghargai-persamaan-kedudukan-warga.html>), diakses pada 16 Februari 2016

1. *Ius Soli* (disebut asas kelahiran), asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau tempat dimana dilahirkan, dianut oleh Inggris, Mesir, Amerika dll.

2. *Ius Sanguinis* (asas keturunan), asas ini yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut darah dan keturunan dan orangtua yang bersangkutan. Dianut oleh Republik Rakyat Cina (RRC).

3. Naturalisasi (pewarganegaraan)

Menurut Undang-Undang yang sekarang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka asas yang dipakai Indonesia dalam menentukan kewarganegaraan adalah:

1. Asas *Ius soli* (law of blood)
2. Asas *Ius sanguinis* (law of the soil)
3. Asas kewarganegaraan tunggal
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas (hanya berlaku bagi anak sampai usia 18 tahun).

Selanjutnya sependapat penulis dengan artikel M. Asad Amaduddin berjudul persamaan kedudukan warga negara yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara

lain, dan negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya.¹⁷

C. Eksistensi Pengangkatan Anak

Eksistensi pengangkatan anak telah ada sejak beberapa tahun yang lalu bahkan beberapa ratus tahun yang lalu. Hampir setiap bangsa mengenal lembaga pengangkatan anak dengan nama dan tata cara tersendiri serta dengan latar belakang yang berbeda-beda. Baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui biro-biro jasa, seperti di Amerika dan Inggris, dengan maksud untuk menemukan anak yang diangkat sesuai kehendak orang tua angkat.

Pengangkatan anak di negara-negara barat, berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia II. Saat itu banyak anak-anak yang kehilangan orang tua kandungnya karena gugur dalam medan pertempuran, disamping banyak pula anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Pengangkatan anak di Indonesia mulanya dijalankan berdasarkan Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1979 No. 129, dalam ketentuan ini pengangkatan anak tidak saja berasal dari anak yang jelas asal usulnya, tetapi juga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (tidak jelas asal usulnya).¹⁸

Pengangkatan anak oleh masyarakat dipandang sebagai suatu perbuatan terpuji dan positif. Apalagi jika yang diangkat adalah anak-anak dan kalangan tidak mampu. Sebab dengan diangkatnya anak tersebut oleh orang tua angkat yang mampu dan berkecukupan, maka masa depan dan kesejahteraan anak dapat

¹⁷ M. Asad Ammaduddin, *Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara*, (<http://kewarganegaraan.blogspot.com/2008/07/menghargai-persamaan-kedudukan-warga.html>), diakses pada 16 Februari 2016

¹⁸ Muderis Zaini; *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 47

dipertanggung jawabkan. Hal ini berarti pula mengurangi kemungkinan bertambahnya berbagai gangguan terhadap masyarakat akibat berbagai tindak kejahatan yang tidak menutup kemungkinan akan dilakukan oleh anak-anak fakir yang tidak diangkat sebagai anak angkat.

Oleh karena itu hampir semua negara mengenal lembaga pengangkatan anak. seperti Amerika, Inggris, Belanda dan tentunya Indonesia. Namun tiap-tiap negara mempunyai suatu wawasan tersendiri dalam hal pengangkatan anak. Perbedaan wawasan tersebut menimbulkan pula perbedaan latar belakang (motivasi) dalam pengangkatan anak serta syarat-syaratnya. Walaupun di sana-sini tentunya terdapat persamaan.

Di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan ras juga telah mengenal pengangkatan anak. Dahulu pengangkatan anak hanya berlatar belakang (motif) pada ketiadaan turunan sama sekali atau karena dengan dasar untuk memperoleh keturunan laki-laki.

Maka dari itu pengangkatan anak merupakan kebutuhan positif masyarakat yang makin berkembang dan variatif sesuai perkembangan masyarakat itu sendiri.

Menurut Musthota Sy, perkembangan pengangkatan anak tersebut berkembang pula latar belakang (motivasi) yang secara sistematis dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁹

a. Karena tidak mempunyai anak

¹⁹ Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 44

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia. suatu keluarga tentunya terdiri dari suami, isteri, dan anak. Namun suatu perkawinan yang telah berlangsung cukup lama ternyata masih belum membuahkan anak. Untuk itu hukum memungkinkan suami-istri tersebut mengangkat anak sebagai pengganti anak kandung.

b. Karena rasa iba

Pengangkatan anak dapat juga terjadi karena didorong oleh rasa iba terhadap seorang anak yang tidak mendapat apa yang seharusnya diperoleh seorang anak, artinya karena keadaan orang tuanya maka orang tuanya tidak dapat memberi nafkah.

c. Karena unsur kepercayaan

Masyarakat adat dari beberapa golongan masyarakat lainnya yang ada di Indonesia, seperti orang Tionghoa masih kuat kepercayaannya tentang hal-hal yang bersifat sakral.

Dan ada pula orang tua yang mengangkat anak angkat didasari oleh suatu kepercayaan, bahwa jika mengangkat anak angkat, maka hal itu akan mendatangkan keberuntungan-keberuntungan bagi keluarganya.

d. Sebagai penyambung generasi (keturunan)

Motivasi atau latar belakang yang lain dan pengangkatan anak adalah untuk menyambung generasi (keturunan) satu keluarga yang sama sekali tidak mempunyai anak lelaki tetapi anak perempuan tidak dapat melanjutkan generasi.

e. Karena pertimbangan ekonomi

Motivasi pengangkatan anak yang akhir-akhir ini makin berkembang adalah atas dasar kepentingan ekonomi. Pada Pengadilan Negeri Makassar, pengadilan anak banyak dilakukan oleh pegawai negeri dengan pertimbangan anak angkatnya akan mendapat tunjangan anak dan hak pensiun. Disamping itu pengangkatan anak diharapkan oleh orang tua angkat, si anak akan membantu dalam mencari nafkah atau membantu dalam berusaha, sehingga tidak perlu merasa khawatir untuk hidup terlantar.

Selanjutnya Muderis Zaini, menyebutkan inti dan motif pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia dapat diringkaskan sebagai berikut:²⁰

1. Karena tidak mempunyai anak
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu)
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung
6. Untuk menambah tenaga dalam keluarga
7. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak
8. Karena unsur kepercayaan
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung

²⁰ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 15

10. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak
11. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak
12. Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus
13. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan
14. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal atau, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk di adopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Berangkat dari beberapa latar belakang atau motif pengangkatan anak di atas yang menyebabkan adanya eksistensi pengangkatan anak maka penulis setuju bahwa adopsi yang terjadi di Indonesia bukan hanya sebagai lembaga pengangkatan anak semata tetapi juga merupakan suatu lembaga hukum yang tumbuh di kalangan masyarakat sebagai suatu kebutuhan yang bertujuan untuk meneruskan keturunan dan sebuah keluarga apabila di dalam sebuah perkawinan tidak memperoleh keturunan.²¹

D. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian dan pengaturan agar tata tertib mendapat perhatian dan mempunyai kekuatan hukum, baik dari orang tua angkat terlebih lagi anak angkat. Sebab tanpa dasar hukum pengangkatan anak, maka akan menimbulkan keraguan keabsahan pengangkatan anak tersebut.

²¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2008), h. 20

Adapun menurut Mustofa Sy, aturan-aturan hukum yang mengatur pengangkatan anak dapat digolongkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:²²

a. Kategori perundang-undangan meliputi:

1. Staatsblad 1917 No. 129, RAB II Tentang Pengangkatan Anak Untuk Orang Tionghoa

Staatsblad ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh pasangan yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.

Pengangkatan anak menurut Staatsblad ini hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris (Pasal 10). Namun Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan. Selanjutnya ketentuan mengenai syarat pengangkatan anak terdapat pada Pasal 8 dan perihal mengenai pengecualian terhadap akibat hukum yang ditimbulkan peraturan perundang-undangan ini terdapat pada Pasal 14.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) penetapan pengangkatan anak dilakukan berdasarkan hukum Islam praktek pengadilan agama, berdasar pada Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia Inpres No

²² Mustofa sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: kencana, 2008), h. 159

I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Menetapkan bahwa anak angkat ialah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sendiri, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dan orang tua asli kepada orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak

Perihal pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ini terdapat pada Pasal 12 yang menyatakan bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasar peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak tercantum bahwa orang tua adalah pihak yang paling utama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak. Namun adakalanya orang tua tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka pengangkatan anak adalah jalan yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu berdasarkan peraturan perundang-undangan ini penulis memaparkan bahwa seorang anak berhak atas penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta dapat menjamin pertumbuhan perkembangannya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Bab VIII Bagian kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini memberikan penjelasan mengenai pengangkatan anak.

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan anak seharusnya tidak memutuskan hubungan antara seorang anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini diatur secara tegas pada Pasal 39 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dari orang tua kandungnya.

Salah satu syarat pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat yang diatur secara tegas pada Pasal 39 ayat (3). Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Pengangkatan anak oleh Negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Selanjutnya dalam Pasal 40 menyatakan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dari orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Maka dari itu pemerintah serta masyarakat memiliki peran serta dalam melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Dasar hukum kompetensi Pengadilan Agama untuk menetapkan anak angkat berdasarkan hukum Islam adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan.

Pada penjelasan pada Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ini diuraikan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah dan mengenai penetapan asal-usul seorang anak serta penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam menjadi salah satu diantaranya.

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1953 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan

orang tua angkat (private adoption), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah belum menikah (single parent adoption). Jadi, jika seseorang yang belum menikah atau memutuskan untuk tidak menikah dan ingin mengadopsi anak, ketentuan ini sangat memungkinkan untuk melakukan pengangkatan anak.

7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan anak

Secara teknis pengangkatan anak berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 ini merupakan himbauan kepada para Hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh:

1 Ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak yang memberi putusan mengenai persyaratan, bentuk permohonan, tata cara pemeriksaan dan bentuk putusan terhadap pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia , dan permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua Warga Negara Asing (inter country adaption).

b. Kategori menurut hukum adat

Pengangkatan anak dalam hukum adat bukan merupakan lembaga yang asing Lembaga ini dikenal luas hampir di seluruh Indonesia yang dilakukan dengan cara dan motif yang bervariasi meski dalam hukum adat sendiri tidak terdapat peraturan secara tertulis tetapi dasar hukum pengangkatan anak dapat dijumpai pada kebiasaan masyarakat adat melalui berbagai upacara adat perigangkatari anak yang berbeda di tiap daerah di Indonesia.

Human Hadikusma berpendapat bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau keturunan. Sistem kekeluargaan di Indonesia dibedakan menjadi tiga corak:²³

- Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak, kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan perempuan.
- Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan laki-laki.
- Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi, yaitu bapak dan ibu, kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan.

c. Kategori Hukum Islam

Sebelum Islam datang, pengangkatan anak di kalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun-temurun yang dikenal dengan istilah *tabbani* yang artinya mengambil anak angkat.²⁴

²³ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 62

Dalam hukum Islam pengangkatan anak pada dasarnya tidak dibenarkan sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surah Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5:

مَا عَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ لَّبِيفٍ فِي جَوْفِهِ^ع وَمَا عَلَ زَوْجَكُمُ الَّتِي تَظْهَرُونَ
مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ^ع مَا عَلَ دَعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ^ع أَلَيْسَ لَكُمْ بِأَفْوَهِكُمْ^ع اللَّهُ يَقُولُ
الْحَقُّ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ^ع إِنْ لَمْ
تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ إِيخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ^ع لَيْسَ لَكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ^ع لَكِن مَّا عَمَدَتْ قُلُوبُكُمْ^ع وَكَانَ اللَّهُ فَورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Terjemahnya:

"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)." "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari ayat-ayat tersebut memberikan gambaran yang sangat signifikan dalam hal ini teksnya tidak menyatakan pelarangan adopsi, namun menganjurkan kata 'anak' dengan hormat kepada anak angkat hanyalah frasa bukan falda darah daging. Anak angkat bukanlah anak genetika dan lebih kepada saudara seiman. Tujuan ayat itu jelas untuk mencegah pelarangan yang legal dari metafora 'anak' dalam penjelasan hubungan adopsi.

²⁴ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 51

Berdasarkan ayat tersebut Majelis Ulama Indonesia melalui Musyawarah Kerja Nasional yang diselenggarakan pada bulan Maret 1984 memfatwakan sebagai berikut:²⁵

- a. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
- b. Mengangkat anak (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'at Islam.
- c. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang. Seperti anak sendiri adalah perbuatan terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
- d. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Dari uraian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa praktek pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya menghapus beberapa hal sebagai koreksi seperlunya.

E. Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Asing (WNA)

Pengangkatan anak secara etimologi kata adopsi berasal dari kata 'adoptie' Bahasa Belanda, atau 'adopt (adoption)' bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan

²⁵ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Tnp, Jakarta, 2003, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI (<http://assunah.or.id>), diakses Pada 27 Februari 2016.

anak, mengangkat anak. Pengertian dalam Bahasa Belanda menurut kamus hukum, berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Jadi di sini penekanannya pada persamaan status anak angkat dan hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung ini adalah pengertian secara literlik, yaitu adopsi di dalam Bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak. Dalam Bahasa Arab disebut *tabbani* yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat, sedangkan dalam kamus Munjid diartikan *ittikhadzahu ibnan*, yaitu menjadikannya sebagai anak²⁶

Mam-ad-dean, Ph.d, menjelaskan istilah Islam untuk pengangkatan anak adalah *kafâla* arti secara tekstual berarti dukungan, namun bila ditelusuri hingga akar kata berarti memberi makan. Alih bahasa terbaik adalah pengasuhan anak angkat dalam budaya keluarga Aijeria misal, hukum keluarga menjelaskan konsep secara langsung: *Kafala*, atau pengangkatan anak secara legal adalah janji untuk memelihara tanpa bayaran atas yang diangkat anak. dalam hal pendidikan dan perlindungan minor, seperti yang dilakukan seorang ayah pada anak kandungnya sendiri.²⁷

Secara terminologi, Muderis Zaini mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi adopsi, antara lain.²⁸

²⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 4

²⁷ Mam-ad-dean, Ph.d, *Rambu-Rambu Dalam Adopsi Anak*, ([http://ilmucomputer2.blogspot.com/search/label/pengertian anak angkat menurut kompilasi hukum islam](http://ilmucomputer2.blogspot.com/search/label/pengertian%20anak%20angkat%20menurut%20kompilasi%20hukum%20islam)), diakses Pada 28 Februari 2016

²⁸ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 6

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Dalam Ensiklopedia umum disebutkan bahwa adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Hilman Hadi Kusuma bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Sedangkan Surojo Wignjodipuro memberikan batasan bahwa adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu akibat hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.

Kemudian Mahmud Syaltut, seperti yang dikutip secara ringkas oleh Fatchur Rachman membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu : Pertama; penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia dapat diperlakukan sebagai anak dalam segi

kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Kedua; yakni yang dipahami dan perkataan *tabbani* (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syaria adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. *Tabbani* ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak. Dengan demikian istilah anak angkat menurut pengertian pertama dan pendapat Mahmud Syaltut yang lebih tepat untuk budaya Indonesia yang mayoritas penduduk Islam, sebab pada istilah tersebut ditekankan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Kemudian pengertian pengangkatan anak menurut R. Subekti dan Tirtosoedibyo pengangkatan anak yang disebut juga adopsi, yaitu penciptaan hubungan orang tua-anak oleh perintah pengadilan antara dua pihak yang biasanya tidak mempunyai hubungan (keluarga). Jadi, anak yang tadinya tidak mempunyai hubungan darah dengan ayah atau ibu angkatnya setelah diadopsi dianggap anak sendiri.²⁹

Pengertian pengangkatan anak menurut Imam Sudayat ialah suatu perbuatan memungut seorang anak dan luar ke dalam kerabat sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kebangsaan biologis.³⁰

²⁹ R. Subekti dan Tirtosoedibyo, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Pratama, 1996), h. 6

³⁰ Imam Sudayat, *Hukum Adat, Sketsa Adat*, (Yogyakarta: liberty, 1981), h.102

Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian mengenai anak angkat yaitu anak yang haknya dialihkan dan lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengertian anak angkat juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam Pasal 171 huruf (h) ‘anak angkat yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dan orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.’”

Definisi Pengangkatan Anak menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah sebagai berikut : “Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dan lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Legalitas, menyimpulkan bahwa pengangkatan anak, haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³¹

1. Merupakan suatu perbuatan hukum
2. Dimana perbuatan tersebut harus mengalihkan seorang anak

³¹ Legalitas, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Indonesia*, Diposting Pada 14 Januari 2009, (<http://eckozblog.blogspot.com/2009/01/pengangkatan-anak-menurut-hukum-di.html>) diakses Pada 29 Maret 2016

3. Dan lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut
4. Anak tersebut harus tinggal kedalam keluarga orang tua angkat.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 berbunyi “pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.” Di dalam Pasal 3 juga menyebutkan pengangkatan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasar peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-undangan ini belum ada sampai sekarang maka untuk memenuhi kebutuhan dilaksanakan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1987 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1989.

Dedy Iskandar, menyatakan bahwa adopsi menurut hukum adat berbeda-beda. Masyarakat Jawa umumnya masih menganut prinsip yang hampir sama dengan Islam, yaitu: adopsi tidak menghapus hubungan darah anak dengan orang tua kandung. Tetapi di Bali, misalnya, pengangkatan anak adalah melepaskan anak dan keluarga asal ke keluarga baru. Anak tersebut akan menjadi anak kandung dan orang tua yang mengangkatnya.³²

Darmanto Hadi, menyatakan bahwa Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai turunnnya sendiri. Menurut Hukum Adat, pengangkatan anak dapat dilakukan secara terang

³² Dedi Iskandar, *Adopsi Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama*, ([http://pa-temanggung ptasemarang. Net](http://pa-temanggung.ptasemarang.Net)), diakses Pada 28 Februari 2016

tunai dan diam-diam. Pengangkatan anak dengan terang tunai adalah suatu perbuatan pengangkatan anak dengan resmi dan nyata yang biasanya ditandai dengan upacara adat, disaksikan tetangga, kerabat dan para saksi seperti tetua adat, dan biasanya orang tua angkat memberikan uang atau benda lain sebagai simbol sahnyanya pengangkatan anak. Sedangkan pengangkatan anak dengan cara diam-diam yaitu pengangkatan anak cukup dengan adanya pengakuan dan orang tua angkat dan tampak dalam kenyataan pergaulan sehari-hari. Dalam perkembangannya, ada sebagian orang Indonesia melakukan pengesahan pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan Negeri.³³

Edy Sucipto menyatakan dalam Hukum Islam pengangkatan anak hanya bersifat tolong-menolong. Ajaran Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan sebagainya dan menganggapnya sebagai suatu amal dan tidak memutuskan hubungan nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya, sehingga kedudukan anak angkat tersebut tidak sama dengan anak kandung.³⁴

Hombar Pakpahan, menyatakan bahwa Hukum Islam menjelaskan pengangkatan anak dengan istilah *tabanni*, dan dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi adopsi tersebut adalah pemalsuan atas realitas kongkrit. Pemalsuan yang menjadikan seseorang yang sebenarnya orang lain bagi suatu keluarga, menjadi salah satu anggotanya. Ia bebas saja berduaan dengan kaum perempuannya,

³³ Darmanto Hadi, *Pengangkatan Anak Sebagai Usaha Perlindungan Anak*, (<http://www.zorpia.com/ytedianto>), diakses Pada 28 Februari 2016

³⁴ Edy Sucipto, *Hadhanah Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Medan*, (<http://library.usu.ac.id/download/fh/D200471.pdf>), diakses Pada 1 Maret 2016

dengan anggapan bahwa mereka adalah mahramnya padahal secara hukum mereka adalah orang lain baginya isteri ayah angkatnya bukanlah ibunya, demikian pula dengan puteri, saudara perempuan, bibi, dan seterusnya. Mereka semua adalah *ajnabi* (orang lain) baginya. Dalam istilah yang sedikit kasar Yusuf Qardhawi menjelaskan ‘anak angkat dengan anak aku-akuan’.³⁵

Dari berbagai defenisi di atas mengenai pengertian pengangkatan anak dapat penulis simpulkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga baru yang mengakibatkan beralihnya tanggung jawab pemeliharaan anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan.

Bagi Indonesia, pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum belum berada dalam keadaan yang seragam, baik motivasi maupun caranya. Karena itu, masalah pengangkatan anak atau adopsi ini masih menimbulkan masalah bagi masyarakat dan pemerintah. Terutama dalam rangka usaha perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selama ini memang belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai pengangkatan anak. kecuali bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Cina, yaitu dengan Staatsblad 1917 Nomor 129.

³⁵ Anaklaut, *Konsep Adopsi Dalam Islam Dan Kaitannya Dengan Sumber Daya Manusia*, Di Posting Pada Agustus 2008, (<http://one.indoskripsi.com/node/4483>), diakses Pada 1 Maret 2016

Di samping Undang-Undang Kesejahteraan anak, peraturan lain yang mencantumkan ketentuan berkaitan dengan pengangkatan anak di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang belum berusia (5) lima tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga Negara asing (WNA) berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Mengingat belum terbentuknya peraturan mengenai pengangkatan anak. Maka sebagai pedoman digunakan antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 yang kemudian disempurnakan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983.

Salah satu isi dan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 menentukan bahwa warga negara asing (WNA) yang akan mengadopsi anak Warga Negara Indonesia (WNI) harus sudah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia selama minimal (3) tiga tahun. Selain itu, calon orang tua angkat harus mendapat izin tertulis dan Menteri Sosial. Pengangkatan anak harus dilakukan melalui yayasan sosial yang memiliki izin dan Departemen Sosial untuk bergerak di bidang pengangkatan anak. Pengangkatan anak Warga Negara (WNI) yang langsung dilakukan orang tua kandung WNI dengan calon orang tua Warga Negara Asing (WNA) tidak diperbolehkan. Seorang Warga Negara Asing (WNA) yang belum atau tidak menikah tidak boleh mengangkat anak Warga Negara Indonesia (WNI) dan calon anak angkat Warga Negara Indonesia (WNI) harus berusia di bawah lima tahun.

Selanjutnya Ahmad Kamil dan M. Fauzan menyatakan bahwa mengenai perihal agama bagi anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang diadopsi oleh Warga Negara (WNA) sebelum tahun 2003 maka agama bagi anak yang diadopsi tidak dapat dipantau tetapi sejak tahun 2005 pengangkatan anak dimaksud dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang tua biologis si anak.³⁶

Berdasarkan uraian ini maka pengangkatan anak WNI oleh WNA dan Status Anak Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Warga Negara Asing telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tepatnya Pasal 5 Ayat (2) akan tetapi syarat pengangkatan anak di Indonesia masih berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan, hal ini disebabkan karena Surat Edaran Mahkamah Agung ini mengikuti perkembangan pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia guna menjamin upaya perlindungan anak yang di angkat oleh orang tua angkat terkhusus pada anak warga Negara Indonesia yang di angkat oleh Warga Negara Asing, meski hingga saat ini belum terbentuknya peraturan mengenai pengangkatan anak secara terperinci.

³⁶ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 43

BAB III METODOLOGI

PENELITIAN

Setiap penelitian ilmiah, agar tetap terarah dan sistematis haruslah menggunakan metode yang sesuai dengan obyek penelitian. Metode sendiri ialah sebuah cara, jalan (the way). Apabila dikaitkan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut metode kerja; yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang dikaji.¹

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Kelas 1a Makassar.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dan menggunakan data kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk melukiskan keadaan obyek dan peristiwa.²

Data yang terdapat di lapangan dicari kecocokannya dengan teori yang terdapat dalam literatur. Untuk itu tidak lepas dari berbagai data yang diperoleh

¹ Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kansius, 1990), h. 14

² Dadang Kahmad, *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 90

berdasarkan penelitian lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang obyeknya berupa non-angka.³

Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan diperoleh penafsiran yang mendalam mengenai makna dari fakta yang relevan. Pendekatan kualitatif di mana kajiannya diusahakan mendasar, mendalam berorientasi proses. Dipandang sesuai karena sifat datanya bersumber dari fenomena alamiah. Penelitian menggunakan data kualitatif karena dalam penelitian ini variabelnya mempunyai ciri khas tersendiri, diungkapkan dengan kata atau label serta tidak menggunakan angka-angka dalam memberikan kategori.⁴

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarahkan pada persoalan yang ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks, Alquran dan Alhadis. Kaidah fiqiyah dan pendapat para ulama.
2. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah pengangkatan anak dan tata aturan beracara di Pengadilan Negeri.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 225-237

⁴ Lexi J Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 29-53

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, maupun wawancara langsung dengan narasumber dari kalangan praktisi hukum yang berkompeten dalam bidangnya.
2. Data sekunder yaitu data yang telah tersaji pada instansi-instansi yang relevan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka dilakukan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (interview) yaitu suatu metode pengumpulan data melalui Tanya jawab atau suatu wawancara langsung yakni dengan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, serta kalangan praktisi hukum yang berkompeten dalam bidangnya
2. Studi dokumen (berkas) merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menelaah dan mengkaji dokumen dari instansi terkait penetapan pengangkatan anak dengan nomor: 01/Pdt.P/2009/PN.Mks serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif yang menuntut peneliti memahami secara langsung dan mendalam terhadap fenomena yang ada di masyarakat. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Seorang peneliti haruslah memiliki kemampuan

terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk objek penelitian.

Peneliti sebagai instrumen penelitian berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data dalam hal ini peneliti memahami teknik penelitian data sehingga bisa memberikan kesimpulan atas temuannya.

Dengan demikian, peneliti selain harus memiliki pengetahuan tentang metode penelitian kualitatif, juga harus disertai dengan alat ukur yang membantu dalam proses penelitian. Adapun instrumen penelitian atau alat yang bisa membantu yaitu berupa laptop, handphone, pulpen, juga kertas dll.

G. Teknik Pengelolaan dan Analisi Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder yang selanjutnya disusun dan dianalisis secara kualitatif dan kemudian dideskripsikan agar menjadi sebuah karya ilmiah/skripsi yang terpadu dan sistematis. Sehingga hasil penelitian nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai kewenangan Pengadilan Agama atas pengangkatan anak menurut UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta akibat hukumnya terhadap anak angkat tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Penetapan Pengadilan

Negeri Nomor: 01/Pdt.p/2009/PN.Mks.

Pada mulanya pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian. Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Sebagaimana diketahui bahwa semula pengadilan yang berwenang memberikan penetapan pengangkatan anak, baik mereka yang tunduk pada hukum Islam adalah Pengadilan Negeri. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa yang berwenang atas pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah Pengadilan Agama. Kemudian Pengadilan Negeri Makassar telah mengesahkan pengangkatan anak dengan Register Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2009/PN.Mks. atas anak warga negara Indonesia yang diangkat oleh calon bapak angkat yang berkewarganegaraan Indonesia dan calon ibu angkat yang berkewarganegaraan asing yaitu warga negara Australia. Keduanya beragama Islam yang sepatutnya mengesahkan penetapan pengangkatan anak tersebut di Pengadilan Agama. Fakta-fakta serta pertimbangan hukum yang

digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kasus Posisi

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan penetapan tersebut antara lain:

- 1) Para pemohon adalah pasangan suami istri yang beragama Islam dan telah menikah kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu pada hari minggu tanggal 11 Maret 2001 bertempat tinggal di Perth Australia, namun belum juga dikaruniai anak dari hasil pernikahan para pemohon.
- 2) Para pemohon telah memanjatkan doa kepada Allah swt. agar semoga dikaruniai anak, namun dalam rentang waktu yang sudah cukup lama anak yang pemohon sangat idam-idamkan belum dikabulkan Allah swt. Maka dari itu pemohon sepakat untuk mengangkat anak atau mempunyai anak asuh yang dapat pemohon rawat dan sayangi sebagai anak kandung pemohon sendiri.
- 3) Para pemohon di suatu waktu yang tak terduga atas rahmat Allah swt. dipertemukan oleh saudari Trisna Handayani (ibu kandung anak) melalui kakak tertua pemohon yaitu Meriam Tasrif.
- 4) Setelah mendengar latar belakang dan ibu kandung calon anak angkat tersebut dan melihat kondisi anak perempuan yang lahir pada tanggal 24 Januari 2008, maka keinginan pemohon menjadi lebih besar sekali untuk merawat dan menjadi orang tua anak tersebut, serta demi masa depan yang lebih baik untuk kesejahteraan anak itu sendiri.

5) Para pemohon berpenghasilan tetap dan mempunyai tabungan serta sehat sehingga layak menjadi orang tua angkat untuk masa depan seorang anak angkat

6) Kewarganegaraan suami pemohon adalah warga negara Republik Indonesia, sedangkan istri pemohon adalah warga negara Australia dan secara administratif Pemerintah Australia tidak keberatan dan telah pula mendapat izin dari Departemen Sosial Republik Indonesia, serta ibu kandung dan anak tersebut tidak keberatan jika anaknya dijadikan anak angkat oleh para pemohon karena telah lama dipelihara dan diasuh oleh para pemohon

7) Berdasarkan hal tersebut para pemohon telah mendapat persetujuan dari seluruh keluarga besar pemohon baik yang berada di Indonesia dan yang berada di Australia berupa dukungan kepada pemohon untuk memperoleh hak asuh dari anak tersebut

8) Para pemohon telah melampirkan surat-surat dan dokumen untuk dijadikan bahan pertimbangan permohonan pemohon yang diajukan di pengadilan, antara lain:

(8.1) Surat keterangan dari Departemen Sosial RI Jakarta

(8.2) Surat memohon izin pengangkatan anak

(8.3) Surat motivasi pengangkatan anak

(8.4) Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) ibu kandung

(8.5) Surat pernyataan dari ibu kandung kepada para pemohon dan kronologis ibu kandung

(8.6) Surat keterangan lahir anak

- (8.7) Akte kelahiran anak
- (8.8) Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami pemohon
- (8.9) Akte kelahiran suami pemohon
- (8.10) Akte kelahiran istri pemohon yang disahkan oleh kedutaan Australia
- (8.11) Foto copy paspor istri pemohon yang disahkan oleh kedutaan Australia
- (8.12) SKCK suami pemohon
- (8.13) SKCK istri pemohon dan kepolisian Australia
- (8.14) Surat keterangan berdomisili izin pemohon dari kedutaan Australia
- (8.15) Surat keterangan berdomisili istri pemohon dari kelurahan Manso
- (8.16) Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah suami pemohon
- (8.17) Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah istri pemohon
- (8.18) Surat persetujuan mengangkat anak warga negara Indonesia dan kedutaan Australia
- (8.19) Foto copy surat nikah pemohon
- (8.20) Foto copy surat tanda bukti pelaporan perkawinan di Republik Indonesia
- (8.21) Kronologis istri warga negara asing pemohon pernah tinggal di Indonesia dan foto copy visa passport
- (8.22) Penghasilan per bulan suami pemohon
- (8.23) Penghasilan per bulan istri pemohon

(8.24) Laporan saldo keuangan dan transaksi di bank (NAB)

(8.25) Pemberian rekomendasi izin pengangkatan anak domestic pada pemohon dari Menteri Sosial Republik Indonesia

9) Berdasarkan surat-surat dan dokumen untuk dijadikan bahan pertimbangan permohonan pemohon, maka pemohon juga telah mengajukan dengan melampirkan surat-surat asli dan foto copy yang dapat dijadikan alat bukti antara lain:

(9.1) Surat permohonan izin pengangkatan anak

(9.2) Surat motivasi pengangkatan anak dari para pemohon

(9.3) Surat pernyataan ibu kandung anak dari Trisna Handayani

(9.4) Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama GITA ELIA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar

(9.5) Foto copy kartu tanda penduduk NIK/NIKS : 737101 1103720006 atas nama suami pemohon

(9.6) Foto copy kutipan akta kelahiran suami pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar

(9.7) Foto copy Passport Dokumen No.E 758266 atas nama istri pemohon

(9.8) Surat keterangan catatan kepolisian atas nama suami pemohon yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Polres Makassar Barat

(9.9) National Police Certificate (surat keterangan polisi) atas nama istri pemohon

(9.10) Surat keterangan berdomisili No.474.1/491/PNB/VII//2008 atas nama istri pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Panambungan Makassar

(9.11) Surat keterangan kesehatan No.Sket/50/VIII/2008 atas namasuami pemohon yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa Rumah Sakit Pelamonia

(9.12) Surat keterangan kesehatan No.Sket/51/VII/2008 atas namaistri pemohon yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa Rumah Sakit Pelamonia

(9.13) To Way it May Concern (surat keterangan untuk mendapatkan anak)

(9.14) To Whom it May Concern (surat keterangan untuk mendapatkan anak)

(9.15) Foto copy Certificate of Marriage (surat nikah)

9.16 Foto copy tanda bukti pelaporan perkawinan Nornor: 470/04-DKCS/1904No.279/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang

(9.17) Surat keterangan kronologis istri warga negara asing pernah tinggal di Indonesia

(9.18) Foto copy visa atas nama istri pemohon

(9.19) Foto copy slip gaji atas nama suami pemohon

(9.20) Foto copy slip gaji atas nama istri pemohon

(9.21) Foto copy rekening bank NAB Internet Banking

(9.22) Surat rekening Bank NAB atas nama para pemohon

(9.23) Surat laporan sosial hasil kunjungan pertama ke rumah calon orang tua angkat para pemohon

(9.24) Surat pemberian rekomendasi izin pengangkatan anak domestik atas nama para pemohon yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

(9.25) Foto copy surat izin pengangkatan anak WNI oleh WNA atas nama para pemohon dan Direktur Pelayanan Sosial Anak Departemen Sosial RI

(9.26) Foto copy Birth Registered in me Distric of Sidney, in the State of New South Wales by Jack Hayward Watson, Register General (akta kelahiran atas nama istri pemohon)

(9.27) Statement of Domicile (surat domisili)

(9.28) Surat laporan sosial anak atas nama Gita Elia

10) Berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan yang terdiri dari dua pegawai negeri sipil pada kantor Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan bagian pengajuan anak serta ibu kandung anak angkat yang terbukti bahwa tujuan para pemohon untuk mengangkat anak tersebut adalah untuk merawatnya, memberikan perlindungan dan untuk kepentingan masa depan anak yang lebih baik demi kesejahteraan anak itu sendiri

11) Dalam penetapan ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa para pemohon telah terbukti ingin mengangkat anak warga Negara Indonesia karena belum mempunyai keturunan semenjak para pemohon menikah dengan tujuan untuk merawatnya, memberikan perlindungan dan untuk kepentingan masa depan lebih baik demi kesejahteraan anak tersebut. Namun, meski pengesahan pengangkatan anak ini

telah disahkan di Pengadilan Negeri Makassar akan tetapi pengangkatan anak bagi umat muslim juga merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang dilaksanakan berdasar hukum Islam.

12) Dalam penetapan ini maka majelis hakim mengabulkan permohonan pengesahan pengangkatan anak untuk demi masa depan anak tersebut yang lebih baik dikemudian hari, selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa pengesahan pengangkatan anak ini telah sah meski tidak dilaksanakan di Pengadilan Agama sepanjang tidak ada pihak yang keberatan atas penetapan ini.

2. Tentang Hukumnya

Berikut ini adalah permohonan yang diajukan para pemohon:

- 1) Para pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 05 Januari 2009 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dibawah Register No : 01/Pdt.P/2009/PN. Mks
- 2) Pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut
- 3) Mengabulkan permohonan para pemohon
- 4) Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang diberi nama GITA lahir di Makassar pada tanggal 24 Januari 2008 adalah anak kandung sah dari para pemohon
- 5) Membebaskan biaya acara permohonan ini kepada pemohon

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Adapun dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim di Pengadilan Negeri Makassar untuk menyelesaikan perkara dalam penetapan No. 01/Pdt.P/2009/PN.Mks, yaitu:

- 1) Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan para pemohon untuk mengangkat anak Warga Negara Republik Indonesia
- 2) Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan para pemohon, menyatakan menurut hukum bahwa GITA ELLIA lahir di Makassar pada tanggal 24 Januari 2008 adalah anak angkat sah para pemohon dan membebankan biaya penetapan ini kepada para pemohon sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 3) Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan para pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat asli dan foto copy dan alat bukti saksi 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) orang dan kantor Dinas Sosial dan 1 (satu) orang adalah ibu kandung dari anak yang akan diangkat oleh para pemohon.
- 4) Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bila dikaitkan dengan SEMA No.6 Tahun 1983 Jo. SEMA No. 4 Tahun 1989 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2005 Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Terutama Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 tidak bertentangan.
- 5) Menimbang, bahwa para pemohon adalah dua kewarganegaraan yaitu suami pemohon adalah warga negara republik Indonesia dan asal pemohon adalah warga negara Australia sehingga tidak merupakan Inter Country

Adaption dan karenanya permohonan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Makassar karena anak angkat (GITA ELLIA) lahir di Makassar, namun diperlukan izin dari Departemen Sosial Republik Indonesia karena istri pemohon adalah warga negara Australia yang telah dikuatkan oleh saksi dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

6) Menimbang, bahwa keluarga para pemohon adalah berpenghasilan, berbadan sehat, sejahtera dan berkemampuan sehingga dipandang layak sebagai orang tua angkat GITA ELLIA yang lebih baik dikemudian hari dan permohonan pemohon beralasan dan sah menurut hukum sehingga patut dikabulkan

7) Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan pendapat Ahmad Kamil dan M. Fauzan dalam bukunya “Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia” yang menyatakan bahwa “anak angkat sebagai bagian dari status anak Indonesia adalah bagian dan amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak angkat dan anak pada umumnya merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar anak angkat kelak dapat mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu

dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.”

8) Menimbang, bahwa perihal kesaksian pihak Imigrasi yang tidak dihadirkan dalam persidangan sebab pihak Imigrasi akan dihadirkan bila nantinya anak angkat tersebut akan dibawa ibu angkatnya keluar negeri dan pernyataannya akan dimuat dalam berkas permohonan, dan dalam penetapan ini ibu angkat juga tidak melampirkan surat pernyataan tersebut di persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mustari, salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Makassar, bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan di Pengadilan Negeri Makassar ini sudah benar meski mereka dalam hal ini para pemohon beragama Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga mempunyai kewenangan atas pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi pertimbangan di Pengadilan Negeri yaitu karena mereka tunduk pada hukum barat.¹

Mustari juga menambahkan, bahwa Pengadilan Negeri Makassar lebih berhak menetapkan kewenangan atas permohonan pengangkatan anak warga negara Indonesia terhadap warga negara asing, mengingat status kewarganegaraan seseorang memang kewenangan Pengadilan Negeri. Kemudian hal ini akan berkaitan dengan masalah warisan bagi anak angkat tersebut yang nantinya menjadi pewaris dari orang tua angkatnya meski permohonan pengangkatan anak

¹ Mustari, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 7 Maret 2016.

ini pemohonnya beragama Islam. Penting untuk diketahui bahwa hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, namun praktik pengangkatan anak di tengah-tengah sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya hidup di masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan permasalahan dasar hukum apa yang digunakan dalam penerapan pengangkatan anak di Indonesia, sebab di negara kita mayoritas penduduknya beragama Islam. Bila ditinjau dari hukum barat maka bagi mereka yang mengangkat anak akan menyebabkan putusnya hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya dan bila ditinjau dari hukum Islam maka hubungan nasab tidak akan putus antara anak dari orang tua kandungnya sebab dalam hukum Islam lebih mengenal pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan anak.

Menanggapi hal ini Drs. Muh. Iqbal, M.H, salah seorang hakim di Pengadilan Agama kelas IA Makassar mengatakan bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pengangkatan anak adalah asas personalitas keIslaman. Asas personalitas keIslaman yakni bahwa para pihak harus beragama Islam. Pada pengangkatan anak yang dimaksud para pihak adalah calon orang tua angkat dan calon anak angkat.²

Kemudian mengenai pengajuan permohonan pengangkatan anak, menurut Hartinah, selaku panitera muda permohonan di Pengadilan Agama kelas IA, bahwa permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama yang berwenang di tempat kediamannya. Pelaksanaan pengajuan permohonan sesuai dengan aturan yang terdapat pada

² Drs. Muh. Iqbal, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar, 9 Maret 2016.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak serta berdasar pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUKI/KEP/VII/1984.³

Selanjutnya menurut Hartinah, perihal mengenai permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan pemohon pengangkatan anak sebagai calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yakni:

1. Berstatus kawin dan berumur 25 tahun atau maksimal 45 tahun
2. Selisih umur antara calon anak angkat dan orang tua angkat minimal 20 tahun
3. Pada saat pengajuan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 tahun dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut:
 - 1) Tidak mungkin mempunyai anak
 - 2) Belum mempunyai anak
 - 3) Mempunyai anak kandung satu orang
 - 4) Mempunyai seorang anak angkat dan seorang anak kandung
4. Mempunyai kemampuan ekonomi (dibuktikan dengan alat-alat bukti)
5. Berkelakuan baik (dibuktikan dengan alat-alat bukti)
6. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan alat-alat bukti)

³ Hartinah, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, makassar, 9 Maret 2016.

7. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan anak.

Sedangkan persyaratan bagi anak angkat adalah sebagai berikut:

1. Berumur kurang dan 5 tahun
2. Persetujuan tertulis dan pemerintah negara asal anak angkat (untuk Inter Country Adaption)
3. Berada dalam asuhan organisasi sosial.

Pada proses persidangan menurut Drs. Muh. Iqbal, M.H, majelis hakim dalam melakukan penetapan harus mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Adapun alat bukti yang sering digunakan dalam permohonan pengangkatan anak adalah alat bukti *syahadah* (saksi) dan *maktubah* (bukti tertulis). Bukti-bukti yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁴

1. Foto copy surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kandung pada pemohon
2. Foto copy surat keterangan berbadan sehat
3. Foto copy surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian
4. Foto copy kutipan akta nikah
5. Foto copy slip gaji atau daftar perincian gaji yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
6. Foto copy akta kelahiran calon anak angkat
7. Keterangan saksi-saksi

⁴ Drs. Muh. Iqbal, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar, 9 Maret 2016.

Drs. Muh. Iqbal, M.H menambahkan, bahwa hakim dalam memperhatikan pertimbangan hukum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Apabila terbukti dan majelis hakim memiliki keyakinan terhadap hal ini maka majelis hakim akan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon, serta
3. Menetapkan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara.

Diantara tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan dokumen hukum. Dokumen yang menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum, dan lain-lain.⁵

Penetapan Pengadilan Negeri Makassar tentang pengangkatan anak merupakan salah satu dokumen hukum yang sangat penting. Dengan ditetapkannya seorang anak menjadi anak angkat sah dari para pemohon, maka dapat dipandang bahwa anak angkat tersebut seolah-olah sebagai anak yang baru lahir di tengah-tengah keluarga para pemohon yang menimbulkan hak dan kewajiban anak tersebut yang dipersamakan dengan anak kandung. Namun dengan adanya penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam oleh

⁵ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2008), h. 53

Pengadilan Agama, maka hak dan kewajiban anak angkat tidak akan sama dengan anak kandung.

Menanggapi hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Sukarno, salah seorang pakar hukum serta dosen di salah satu perguruan tinggi di Makassar berpendapat bahwa pada dasarnya hukum Islam tidak mengenal anak angkat kalau pun ada penetapan pengangkatan anak yang diajukan pemohon yang beragama Islam dan dilaksanakan di Pengadilan Negeri, maka pada dasarnya pemohon tunduk pada sistem hukum positif Indonesia begitu pula di Pengadilan Agama maka pada dasarnya ia tunduk pada hukum Islam yang berdasar fikih yang selanjutnya hak anak angkat akan dibatasi oleh kepentingan tertentu salah satunya hak mewaris dari orang tua angkatnya.⁶

Sedangkan Muzakkir, salah seorang pakar hukum serta dosen di salah satu perguruan tinggi di Makassar memiliki pendapat yang berbeda dari pendapat-pendapat sebelumnya, Muzakkir berpendapat bahwa dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak jadi pada dasarnya perihal penetapan tidak perlu dilakukan baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama.⁷

B. Analisis Kewenangan Pengadilan agama Atas Pengangkatan Anak menurut UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Makassar diawali karena pernikahan yang telah berlangsung selama tujuh tahun antara para pemohon yang berdwikewarganegaraan, dimana suami pemohon berkewarganegaraan Indonesia dan

⁶ Sukarno, Wawancara, Makassar 11 Maret 2016

⁷ Muzakkir, Wawancara, Makassar 11 Maret 2016

istri pemohon berkewarganegaraan Australia dan belum dikaruniai seorang anak dan keduanya adalah beragama Islam. Dasar hukum yang dijadikan landasan atas pengangkatan anak ini antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak terutama Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41.

Dalam hal warga negara asing yang mengangkat anak warga negara Indonesia, maka hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Dengan adanya pengangkatan anak antar negara tidak menutup kemungkinan kepentingan negara dan bangsa ikut menentukan aspek-aspek keamanan politik dan budaya bangsa dalam kerangka perkembangan negara. Pancasila lebih-lebih dengan adanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979).

Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berlaku mulai tanggal 21 Maret 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Sebagaimana produk hukum yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Makassar tentang pengangkatan anak yang berbentuk penetapan, maka produk hukum Pengadilan Agama Makassar

tentang pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam juga berbentuk penetapan. Selanjutnya pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah, dan
9. Ekonomi syariah

Kewenangan ini bertambah jumlahnya bila dibandingkan dengan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 yang hanya meliputi 6 (enam) bidang, yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Ada penambahan 3 (tiga) bidang kewenangan, yaitu zakat, infaq, dan ekonomi syariah.⁸

Kemudian mengenai hal-hal yang termasuk dalam bidang hukum perkawinan sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang

⁸ Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 62

diatur dalam penjelasan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syariat, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Penguasaan anak-anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22. Putusan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijalankan menurut peraturan lain.

Musthofa Sy mengemukakan ada 2 (dua) pandangan yang dikemukakan berkaitan kewenangan Pengadilan Agama terhadap penetapan pengangkatan anak sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ini. Pandangan itu masing-masing sebagai berikut:

1. Memandang Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili pengangkatan anak Menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1970 juncto Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman, badan-badan peradilan hanya berwenang menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa*), sedangkan perkara permohonan (*voluntair*) bukan menjadi wewenang badan-badan peradilan, kecuali ditentukan Undang-Undang menjadi wewenang dari badan peradilan. Dengan demikian, kewenangan itu harus disebutkan secara eksplisit dalam perundang-undangan.

2. Memandang Pengadilan Agama berwenang mengadili pengangkatan anak Pengadilan Agama sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam terikat dengan asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka lahir beberapa yurisprudensi pengangkatan anak dalam konteks saling menolong (*ta'awun*) dan semangat akidah hukum Islam.⁹

Selanjutnya dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama ini pula dirumuskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Selain itu juga terdapat frasa antara

⁹ Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 65

“orang-orang beragama Islam “dalam hal ini kata “antara” menunjukkan bahwa Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara yang bersifat sengketa antara pihak beragama Islam yang berlawanan.

Berkaitan dengan penetapan pengangkatan anak yang tidak bersifat sengketa maka hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon dan asas personalitas keIslaman diukur dari pihak pemohon. Dengan demikian apabila orang yang beragama Islam akan melakukan pengangkatan anak, maka akan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Kemudian dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 01/Pdt.P/2009/PN.Mks mengenai pengangkatan anak oleh warga negara asing yang beragama Islam terlihat bahwa ternyata Pengadilan Negeri masih menetapkan permohonan pengangkatan anak setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Adapun faktor yang mempengaruhi dapat dilenturkannya penerapan tersebut yaitu dengan mempertimbangkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mustari sebagai salah seorang hakim Pengadilan Negeri Makassar, bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan di Pengadilan Negeri Makassar sudah relatif meski mereka dalam hal ini para pemohon beragama Islam tapi pertimbangan

mereka dalam mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak tersebut karena mereka tunduk pada hukum barat.¹⁰

Kemudian Mustari juga menambahkan apabila nanti sudah terbit Surat Edaran Mahkamah Agung tentang kewenangan Pengadilan Agama atas pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka Pengadilan Negeri Makassar tidak akan menerima permohonan pengesahan pengangkatan anak lagi baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing muslim.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan persidangan untuk memperoleh keterangan dari pihak Departemen Luar Negeri, Imigrasi dan Kepolisian.

Kemudian Drs. Muh. Iqbal, M.H, salah seorang hakim di Pengadilan Agama kelas IA Makassar berpendapat bahwa penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah benar merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Akan tetapi terhadap pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing yang beragama Islam dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama maka hal ini akan termasuk sebagai pengangkatan anak yang lebih mengarah pada perwalian yang secara implisit akan mengarah pada pemeliharaan anak. Hal ini disebabkan pada dasarnya sistem hukum yang digunakan di Pengadilan Agama adalah bersumber pada hukum Islam yang berasal dari fikih, karena pemohon adalah warga negara

¹⁰ Mustari, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar 7 Maret 2016.

asing yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan terhadap anak yang akan diangkat sebagai anaknya serta untuk menghindari terputusnya hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.¹¹

Lebih lanjut Drs. Muh. Iqbal, M.H memaparkan bahwa, pada intinya pengangkatan anak dalam kewenangan Pengadilan Agama itu tidak akan memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya sebab pada umumnya anak angkat itu berasal dari keluarga dekat baik itu keponakan hingga sepupu yang paling jauh dari keluarga inti terkhusus antar warga negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan demi kesejahteraan dan masa depan anak dengan cara mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak hingga ia dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua karena apabila anak yang masih kecil, belum *mumayiz*, tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat, dididik dengan baik.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sukarno salah seorang pakar hukum dan dosen disalah satu perguruan tinggi Makassar, terkait dengan kewenangan ini, setuju dengan pendapat bapak Drs. Muh. Iqbal, M.H salah seorang hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang menyatakan bahwa

¹¹ Drs. Muh. Iqbal, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar 9 Maret 2016

¹² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2008), h. 115

pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing yang beragama Islam dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama, maka hal ini akan termasuk sebagai perwalian yang secara implisit akan mengarah pada pemeliharaan anak, sebab menurutnya anak yang diangkat oleh para pemohon termasuk pemohon warga negara asing tidak boleh memutuskan hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya dan hak anak tersebut akan terbatas.¹³

Sedangkan menurut Muzakkir salah seorang pakar hukum serta dosen di salah satu perguruan tinggi Makassar, berpendapat bahwa jika dalam hukum Islam memang sudah tidak mengenal pengangkatan anak jadi perihal kewenangan antara Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, Muzakkir tidak setuju meski dalam undang-undang telah menetapkan.¹⁴

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Jadi pada dasarnya semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan peradilan umum (asas generalis). Tetapi kemudian ada ketentuan lain dalam Undang-Undang yang menentukan bahwa terhadap perkara-perkara perdata tertentu menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama (asas *lex specialis*) apabila kedua asas tersebut berhadapan, maka secara *lex specialis* ketentuan khusus tersebut harus diutamakan berlakunya. *Lex specialis derogat lex*

¹³ Drs. Muh. Iqbal, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar 9 Maret 2016.

¹⁴ Muzakkir, Dosen, Wawancara, Makassar 11 Maret 2016

generalis ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.¹⁵

Adapun terhadap pengangkatan anak antara orang-orang beragama Islam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama, ternyata kewenangan tersebut dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan yang menentukan lain. Ada perundang-undangan yang secara khusus (*lex specialis*) mengatur kewenangan pengangkatan anak termasuk di dalamnya bagi orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, dimana perihal ini terdapat dalam Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga merupakan salah satu dasar hukum pengangkatan anak. Pengangkatan anak yang dimaksud meliputi pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh calon orang tua angkat warga negara asing dan pengangkatan anak warga negara asing oleh calon orang tua angkat warga negara Indonesia.

Kemudian dengan adanya asas *lex specialis* tersebut secara tidak langsung kewenangan Pengadilan Agama dibatasi oleh ketentuan undang-undang yang mengatur secara khusus terhadap pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh calon orang tua angkat warga negara asing dan pengangkatan anak

¹⁵ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2008), hal. 9

warga negara asing oleh calon orang tua angkat warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mustari sebagai salah seorang hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat bahwa, pemohon dalam penetapan ini berdwikewarganegaraan, maka ia tidak termasuk dalam inter country adaption yang tidak harus mengikuti ketentuan dan asas *lex specialis* tersebut. Terkait dengan asas *lex specialis* membatasi kewenangan Pengadilan Agama adalah benar adanya sebab hal ini menyangkut tentang negara yang lebih lanjut mengarah pada hubungan internasional antar kedua negara, namun asas *lex specialis* yang membatasi kewenangan Pengadilan Agama ini disebabkan karena undang-undang tentang pengangkatan anak masih tumpang tindih untuk itu diperlukan adanya peraturan yang jelas.¹⁶

Menanggapi hal ini Drs. Muh. Iqbal, M.H sebagai salah seorang hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, berpendapat bahwa dengan melihat kenyataan yang ada selama ini dalam Pengadilan Agama memang belum pernah ditetapkan permohonan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Selama ini yang ada adalah permohonan pengesahan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia yang beragama Islam saja. Mengenai adanya asas *lex specialis* yang membatasi kewenangan Pengadilan Agama atas pengangkatan anak antar negara bagi pemohon yang beragama Islam adalah hal yang tepat

¹⁶ Mustari, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar 7 Maret 2016.

mengingat yang diutamakan yaitu kewarganegaraan pemohon untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan misalnya perdagangan anak.¹⁷

Selanjutnya terkait dengan adanya asas *lex specialis* ini dimana pengangkatan anak yang berkaitan dengan kewarganegaraan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

Sukarno salah seorang pakar hukum serta dosen di salah satu perguruan tinggi Makassar, berpendapat bahwa dengan adanya ketentuan pengangkatan anak seperti ini maka ketentuan tersebut tidak memandang asas personalitas ke-Islaman yang ada di Pengadilan Agama, tetapi memandang keterkaitan dengan kewarganegaraan tanpa memandang agama yang di anut.¹⁸

Meskipun pengangkatan anak oleh warga negara asing yang merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir), ada hal yang harus diperhatikan dalam hal ini yakni anak angkat warga negara Indonesia sama-sama beragama Islam dengan orang tua angkat. Adapun mengenai status kewarganegaraan orang tua angkat anak tersebut merupakan kewarganegaraan campuran.

Menanggapi hal ini Sukarno salah seorang pakar hukum serta dosen di salah satu perguruan tinggi Makassar, berpendapat bahwa dengan sendirinya istri yang berkewarganegaraan asing tersebut akan ikut dan tunduk dengan hukum positif suaminya yaitu hukum yang berlaku di Indonesia apalagi mengingat

¹⁷ Drs. Muh. Iqbal, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar 9 Maret 2016.

¹⁸ Sukarno, Dosen, Wawancara, Makassar 11 Maret 2016

keduanya beragama Islam maka perihal pengangkatan anak ini pada dasarnya sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dengan mengutamakan asas personalitas keIslaman dibanding asas *Iex specialiis* yang membatasi kewenangan Pengadilan Agama.¹⁹

Ketidaksesuaian kewenangan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri atas pengangkatan anak ini selanjutnya melahirkan akibat hukum terhadap anak yang diangkat sebagai upaya perlindungan hukum, sebab suatu perbuatan hukum akan selalu menimbulkan akibat status hukum pula dari perbuatan hukum itu dan dalam perbuatan hukum berupa pengangkatan anak, mempunyai konsekuensi terhadap harta benda, maupun bagi keluarga yang melakukan pengangkatan anak, tanpa suatu bukti tertulis bahwa telah benar-benar dilakukan suatu perbuatan hukum maka hal ini akan menimbulkan permasalahan terutama mengenai beban pembuktian di kemudian hari apabila terjadi suatu sengketa.

M. Budiarto berpendapat akibat atau status hukum dari pengangkatan anak dapat dibagi dua macam yakni:

1. Akibat hukum terhadap anak angkat.

Anak angkat mempunyai hak dalam hal pewarisan harta orang tua angkatnya. Perihal pewarisan terhadap anak angkat dari orang tua angkatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1.1 Anak yang diangkat masih mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua yang mengangkatnya, maka hak waris dengan dua kemungkinan:

¹⁹ Sukarno, Dosen, Wawancara, Makassar 11 Maret 2016

a. Bagi pengangkatan anak yang sama sekali tidak mempunyai keturunan selain anak yang diangkat, maka hak yang pewaris sejajar bagaimana hak mewaris anak kandungnya sendiri. Semua harta kekayaan orang tua angkatnya jatuh pada anak angkatnya sepanjang hanta itu gono gini.

b. Bagi sebuah hubungan telah mempunyai anak namun masih mengangkat anak, maka hak mewaris anak angkat menjadi berkurang dan hal ini biasanya dilakukan dengan musyawarah keluarga tersebut.

1.2 Bagi seorang anak yang diangkat oleh sebuah keluarga dengan tidak ada hubungan kekeluargaan, maka mempunyai kedudukan yang lebih berarti atas hak yang ada pada anak angkat tersebut.

2. Akibat hukum terhadap orang tua angkat

Sebagaimana halnya dalam pengangkatan anak, hak dan kewajiban orang tua angkat dengan anak yang diangkat harus pula seimbang sehingga keharmonisan dan keadilan hukum dapat tercipta. Hak dari orang tua angkat adalah sebagaimana dimaksud ketika ia melakukan pengangkatan anak sesuai dengan latar belakang dan tujuan dari pengangkatan anak itu. Dalam hal kewajiban orang tua angkat adalah memelihara, mendidik dan mengasuh. Anak angkat adalah seseorang yang bukan keturunan dari seorang pasangan suami istri yang dipelihara dan diperlakukan sebagai anak angkat keturunannya. Akibat hukum terhadap pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat tersebut adalah, bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang yang mengangkatnya, dimana di beberapa daerah di Indonesia

mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, termaksud hak untuk mendapatkan harta kekayaan orang tua angkatnya.²⁰

Disisi lain, maka hal ini akan berbanding terbalik dengan ketentuan di Pengadilan Agama atas pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama Islam. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, dan terlantar.

Akan tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah swt. dan tidak boleh ada unsur-unsur tertentu yang mengikat.

Selanjutnya akibat hukum yang ditimbulkan oleh pengangkatan anak yang dilarang dan harus dihindari dalam hukum Islam, antara:

1. Untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya.
2. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram.
3. Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya bisa menimbulkan pernusuhan antara satu keturunan dalam satu keluarga itu. seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan tetapi menjadi ahli waris, sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

²⁰ Muderis Zaini; *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 23

4. Wajib menisbahkan (menghubungkan) anak kepada ayah yang sebenarnya sebab Islam adalah agama keadilan dan menegakkan keadilan, dengan demikian anak tidak boleh dinisbahkan kepada seseorang yang bukan ayahnya.
5. Larangan untuk saling mewarisi dalam sebuah keluarga, apabila anak angkat berbeda agama dengan agama orang tua angkat.²¹

Kemudian jika yang dijadikan sebagai pertimbangan adalah hak mewaris terhadap anak angkat yang kedudukannya akan sama dengan anak kandung, maka hal ini jelas akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasar hasil wawancara dengan Mustari sebagai salah seorang hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat bahwa, akibat hukum yang ditimbulkan terhadap status dan hak anak angkat warga negara Indonesia dan penetapan di Pengadilan Negeri Makassar dan pemohonnya beragama Islam, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut berhak untuk menjadi pewaris dan status, hak, serta kedudukannya akan sama dengan anak kandung. Selain itu pula pengangkatan anak sudah mulai terjadi sejak adanya aturan menteri, hakim, dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang pengangkatan anak sekitar tahun 70-an.²²

Kemudian Drs. Muh. Iqbal, M.H, berpendapat bahwa sudah jelas bila akibat hukum yang ditimbulkan terhadap anak angkat dan pengangkatan anak adalah semua ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam yang tidak akan sama kedudukannya dengan anak kandung orang tua angkat dan tidak menutup

²¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.119

²² Mustari, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar 7 Maret 2016.

kemungkinan hal yang sama akan berdampak pula pada pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing.²³

Perihal hak mewaris atas anak angkat dari orang tua angkatnya berdasar penetapan Pengadilan Negeri secara otomatis akan sama haknya dengan anak kandung orang tua angkat, sebab konsep dasar yang digunakan yaitu Staatblad Nomor 129 Tahun 1917.

Akan tetapi pada dasarnya, Mustari secara pribadi tidak setuju dengan akibat hukum terhadap perihal yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung dan penambahan nama ayah angkat dibelakang nama anak angkat sebab hubungan antara anak angkat tidak boleh diputus sama sekali dari orang tua kandung baik dari segi kasih sayang dan asal-usul anak angkat tersebut. Adapun tentang penetapan permohonan ini, penetapan permohonan yang dimaksud yakni pengangkatan anak dengan nomor penetapan: 01/Pdt.P/2009/PN.Mks untuk melegalkan sebuah perbuatan hukum dan formalitas saja.²⁴

Berdasar hasil wawancara dengan Sukarno salah seorang pakar hukum serta dosen di salah satu perguruan tinggi Makassar, berpendapat bahwa dengan adanya kewenangan tiap-tiap pengadilan terhadap pengangkatan anak maka akan berbeda pula akibat hukum yang akan ditimbulkan terhadap anak. Di Pengadilan Negeri kedudukan anak angkat sudah pasti akan sama dengan kedudukan anak kandung orang tua angkatnya maka ia mendapat hak mewaris dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Sedangkan di Pengadilan Agama hak anak

²³ Drs. Muh. Iqbal, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar 9 Maret 2016.

²⁴ . Mustari, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar 7 Maret 2016.

angkat akan dibatasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu dan hak anak angkat terbatas pada wasiat wajibah dimana anak angkat mendapat maksimal $\frac{1}{3}$ bagian saja dari harta peninggalan orang tua angkat selebihnya diberikan pada ahli waris seperti yang terdapat pada Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.²⁵

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam, istilah wasiat wajibah disebutkan pada Pasal 209 ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Selanjutnya Mustari sebagai salah seorang hakim Pengadilan Negeri Makassar menambahkan bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak dengan nomor: 01/Pdt.P/2009/PN.Mks. sudah sah sepanjang tidak ada pihak yang keberatan meski Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama merupakan juga mempunyai kewenangan atas pengangkatan anak akan tetapi masih perlu dipertegas dan sejauh ini kompetensi relatif Pengadilan Agama juga masih perceraian bagi umat muslim.²⁶

Kemudian menurut hemat penulis dari keseluruhan apa yang telah penulis bahas di atas, maka nampak bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Negeri

²⁵ Sukarno, Dosen, Wawancara, Makassar 11 Maret 2016

²⁶ Mustari, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar 7 Maret 2016.

Makassar yang menetapkan penetapan terhadap pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing, kurang cermat dalam mengkombinasikan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun tidak dapat juga dipungkiri bahwa peraturan perundang undangan Indonesia, terkait dengan pengangkatan anak berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama di Pengadilan Agama belumlah terjadi sinergitas dimana masih terdapat tumpang tindih antara kewenangan Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar khususnya dalam hal pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing yang beragama Islam. Selanjutnya, penulis juga kurang sependapat terhadap asas *lex specialis* yang membatasi kewenangan Pengadilan Agama terhadap pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing yang beragama Islam, sebab dalam hal ini yang berkewarganegaraan asing hanya istri pemohon dan suami pemohon berkewarganegaraan Indonesia, sehingga sepatutnyalah penetapan pengangkatan anak ini ditetapkan di Pengadilan Agama dimana istri akan mengikuti hukum positif yang berlaku di negara suaminya. Selain itu dengan adanya penetapan ini akibat hukum yang ditimbulkan terhadap anak angkat akan bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam surah al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5:

مَا عَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ لَّبَیْنٍ فِیْ جَوْفَہٗ ۚ وَمَا عَلَ زَوْجَکُمُ النِّسَی تَظْہَرُوْنَ
 مِّنْ أُمَّہَتَکُمْ ۚ مَا عَلَ دَعِیَآءَکُمْ أَبْنَآءَکُمْ ۚ اَلْکُمْ وَلَکُمْ بِأَفْوَہِکُمْ ۚ اللّٰهُ یَقُولُ
 الْحَقُّ هُوَ یَهْدِی السَّبِیْلَ ﴿٤﴾ اَدْعُوہُمْ لِآبَآئِہِمۡ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ اِنْ لَّمْ

تَعْلَمُوا أَبَاءَهُمْ إِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ لَيْسَ لَكُمْ جَنَاحَ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ لَكِن مَّا عَمَدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ فَوْرًا رَحِيمًا ﴿١٥٥﴾

Terjemahnya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim di Pengadilan Negeri Makassar untuk menyelesaikan perkara dalam penetapan No. 01/Pdt.P/2009/PN.Mks, yaitu:

- 1) Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan para pemohon untuk mengangkat anak Warga Negara Republik Indonesia
- 2) Untuk menguatkan permohonan para pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat asli dan foto copy dan alat bukti saksi 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) orang dan kantor Dinas Sosial dan 1 (satu) orang adalah ibu kandung dari anak yang akan diangkat oleh para pemohon.
- 3) Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bila dikaitkan dengan SEMA No.6 Tahun 1983 Jo. SEMA No. 4 Tahun 1989 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2005 Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Terutama Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 tidak bertentangan.
- 4) Keluarga para pemohon adalah berpenghasilan, berbadan sehat, sejahtera dan berkemampuan sehingga dipandang layak sebagai orang tua angkat GITA ELLIA yang lebih baik dikemudian hari dan permohonan pemohon beralasan dan sah menurut hukum sehingga patut dikabulkan

2. Permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan di Pengadilan Negeri oleh pemohon yang beragama Islam merupakan kewenangan absolute

Pengadilan Agama tetapi dalam ruang lingkup Pengadilan Agama. Pengangkatan anak terhadap warga negara asing lebih cenderung pada perwalian yaitu pemeliharaan anak demi kesejahteraan anak angkat tersebut, sebab dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab antara anak dan orang tua kandung. Dalam kaitannya dengan penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri haruslah mengutamakan kepentingan anak angkat agar hubungan hukumnya dengan orang tua kandungnya tidak terputus sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Para penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman tentang kewenangan Pengadilan Agama khusus pada pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing yang beragama Islam. Dengan demikian diharapkan, dalam proses penyelesaian kewenangan ini dapat terealisasinya kewenangan absolut pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan dapat terwujudnya tiga tujuan kepastian hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.
2. Hendaknya dilakukan sinergitas dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing yang beragama Islam. Sehingga akan memudahkan para penegak hukum yang bertugas menjalankan peraturan-peraturan tersebut. Selain itu terkait dengan pengangkatan anak ini sebaiknya hakim dalam menetapkan penetapan tersebut ditinjau kembali mengenai agama yang dianut oleh para pemohon yaitu agama Islam yang dalam peraturan perundang-undangan Peradilan

Agama merupakan kewenangannya untuk menetapkan pengangkatan anak berdasar hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: PT. Raja grafindo. 2008.
- Anonim. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Civic Education. UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar. 2007
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Bakker, Anton dan Ahmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kansius. 1990.
- Jamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Kahmad, Dadang. *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Maleong, Lexi j. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.
- Marwati, M. dan Jimmi P. *Kamus Hukum. Dictionary Of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher. 2009.
- R. Soeroso. *Perbandingan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Pers. 2000.
- Sudayat, Imam. *Hukum Adat, Sketsa Adat*. Yogyakarta: Liberti. 1981.
- Sy, Mustofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Kencana Jakarta. 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Subekti, R dan Tirtosoedibyo. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1996.
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Vorkink. 1952.

Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Staatsblad 1917 No. 129, Bab II Tentang Pengangkatan Anak Untuk Orang Tionghoa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Anaklaut. Konsep Adopsi Dalam Islam dan Kaitannya Dengan Sumber Daya
<http://one.indoskripsi.com/node/4483>.

Britania, Aris. Hak dan Kedudukan Anak dalam Keluarga Setelah Terjadinya Perceraian. <http://assunah.or.id>.

Hadi, Darmanto. Pengangkatan Anak sebagai Usaha Perlindungan Anak
<http://www.zorpia.com/ytedianto>.

Iskandar, Dedy. Adopsi Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama. <http://pa-temanggung.ptasemarang.net>.

Dokumen Nasional Penerapan Hukum Keluarga Islam di Indonesia
<http://assunah.or.id>.

Sucipto, Edy. Hadhanah setelah perceraian menurut hukum Islam dan Penerapannya di Pengadilan Agama Medan.
<http://library.usu.ac.id/download/fh/D200471.pdf>.

Fitri, Pengertian. Anak Tinjauan Secara Kronologis dan Psikologis.
<http://duniapskologi.dagdigdu.com/category/psikologi-anak/2314>.

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. tnp. Jakarta. 2003. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI.<http://assunah.or.id>.

Pakpahan, Hombar. Pengangkatan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam. <http://indoskripsi.com/node/4483>.

Ammaduddin, M. Asad. Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara. <http://kewarpeneparaan1.blogspot.com/2008/07/menghargai-persmaan-kedudukan-warqa.html>.

Mam-ad-dean, Ph.d, Rambu-Rambu dalam Adopsi Anak. <http://ilmucomputer2.blogspot.com/search/label/pengertiananakangkatmenurutkomplasihukumislam>.

Legalitas. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Indonesia. <http://eckozblog.blogspot.com/2009/01/pengangkatan-anakmenurut-hukum-di.html>.

Suryadi. Jurnal Musawa Dengan Judul Anak Dalam Perspektif Hadis. <http://assunah.or.id>.

Qardhawi, Yusuf. Halal dan Haram Dalam Islam. <http://ilmucomputer2.blogspot.com/2009/09/pengertian-anak-angkat-menurut.Html>.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian Skripsi “*Pengangkatan Anak Menurut UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Makassar No: 01/Pdt.P/2009/PN.Mks)*”

Masalah pokok skripsi ini, yaitu: Bagaimana pengangkatan anak menurut UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama? Adapun sub-sub masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Makassar No: 01/Pdt.P/2009/PN.Mks ?
2. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama atas pengangkatan anak menurut UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama?

Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang anda ketahui tentang pengangkatan anak?
2. Bagaimana menurut anda pengangkatan anak dengan penetapan di pengadilan negeri yang beragama Islam?
3. Bagaimana sistem pengangkatan anak di Pengadilan negeri?
4. Bagaimana sistem pengangkatan anak di pengadilan agama?
5. Bagaimana prosedur pengangkatan anak oleh warga Negara asing?
6. Bagaimana menurut anda proses pengangkatan anak menurut hukum Islam?
7. Apakah proses pengangkatan anak oleh warga Negara asing yang beragama Islam ini sudah benar dilakukan di pengadilan negeri?
8. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan pengangkatan anak?
9. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pengangkatan anak oleh warga Negara asing?
10. Bagaimana kewenangan pengadilan agama atas pengangkatan anak yang ditetapkan di pengadilan negeri?



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

Makassar, 15 Maret 2016

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ 166 /HKM/III/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

H. RAMLI DJALIL.SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ARIS MUNANDAR**
NIM : 10100111012
Fakultas/Jurusan : Syaria'ah dan Hukum / Peradilan Agama
Alamat : Jl. Samata Gowa
Judul Tesis : "PENGANGKATAN ANAK MENURUT UU NO. 3 TAHUN 2006
TENTANG PERADILAN AGAMA (STUDI KASUS
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NO :
01/PDT.P/2009/PN.MKS)".

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar,
sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan
dari Dekan Fakultas Syariah & Hukum , Universitas Islam Negeri Makassar, tanggal
03 Maret 2016 dengan Nomor : SI.1/PP.00.9/ 1072/2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.





PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14
Telp. : 0411-4794556 Fax : 0411-4794557
Website : www.pa-makassar.net; E-mail : admin@pa-makassar.net
MAKASSAR 90243

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : W20-A1/1485/PB.00/III/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar
Klas I A menerangkan bahwa:

Nama : **Aris Munandar**
Nomor Pokok : 10100111012
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Peradilan Agama
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Makassar
Judul : "Pengangkatan Anak Menurut UU No.3 Tahun 2006
Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Penetapan
Pengadilan Negeri Makassar No:
01/PDT.P/2009/PN.MKS)"

Adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) pada kantor
Pengadilan Agama Makassar Klas IA.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Makassar, 17 Maret 2016

Sekretaris,

Munirah Nahdi, S.H
NIP. 19671210 199903 2 003



RIWAYAT PENULIS

Arismunandar lahir di desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, pada hari rabu tanggal 27 oktober 1993. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga orang bersaudara oleh pasangan Kaimuddin dan Hj. Karedaeng. Pendidikan pertama yang ditempuh penulis di SDN No. 46 Jombe, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Binamu Jeneponto, dan selanjutnya di SMA Negeri 1 Binamu Jeneponto.

Pada tahun 2011, penulis diterima di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur SBMPTN. Penulis mengambil jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syariah dan Hukum. Selama penulis menjadi mahasiswa di UIN Alauddin Makassar, penulis aktif dalam beberapa organisasi internal maupun eksternal yaitu; Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (HPMT).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R